

2025

RENCANA KERJA



Disusun Oleh :
**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2025

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada tanggal 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Ekonomi, SDA
dan Infrastruktur

Verifikator

ADI WIBOWO, ST
NIP. 198111012009031003

DWI FATMA A, S.E., M.Ec.Dev
NIP.19810619 200501 2 016

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah tahun kedua, yang disusun sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 2024 – 2026 yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan yang meliputi urusan pemerintah di bidang pertanian, pangan dan perikanan yang dirumuskan dengan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2023, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Renstra, pagu indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iiii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud Dan Tujuan.	11
1.4. Sistematika Penulisa.....	11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKPPP	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DKPPP Tahun 2022 dan Capaian Renstra DKPPP 2024-2026.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	45
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKPPP.....	105
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	107
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	122
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	122
2.7. Penghargaan	123
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	124
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	124
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DKPPP	124
BAB IV. RENCANA KERJA dan PENDANAAN	130
4.1. Program dan Kegiatan.....	130
BAB V. PENUTUP	154

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan s.d Tahun 2023....	13
Tabel 2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja DKPPP TW I Tahun 2024.....	31
Tabel 2.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja DKPPP Tahun 2022.....	44
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	46
Tabel 2.5. Skor Pola Pangan Harapan	68
Tabel 2.6. Skor pola pangan harapan konsumsi pangan penduduk...	71
Tabel 2.7. Capaian Rasio Ketersediaan Pangan	72
Tabel 2.8. Capaian Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	73
Tabel 2.9. Capaian Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan Capaian Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman.....	74
Tabel 2.10. Rekapitulasi Hasil Uji Pangan segar asal Tumbuhan TW I	75
Tabel 2.11. Capaian Nilai Produksi Perikanan Tahun 2019-2024 TW I.....	75
Tabel 2.12. Tingkat Produktivitas Ikan (Budidaya).....	76
Tabel 2.13. Produksi Ikan Konsumsi (Budidaya).....	77
Tabel 2.14. Persentase nelayan perairan umum yang terbina	78
Tabel 2.15. Data Nelayan perairan umum terbina Tahun 2023	78
Tabel 2.16. Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan	80
Tabel 2.17. Data Jumlah Benih (Ekor) Yang Ditebar Di Perairan Umum	80
Tabel 2.18. Rekap penebaran dan nelayan yang terbina	81
Tabel 2.19. Capaian Angka Konsumsi Ikan	82
Tabel 2.20. Capaian Kontribusi Sektor Pertenain thd PDRB	84
Tabel 2.21. Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan	85
Tabel 2.22. Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura	86
Tabel 2.23. Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan	88
Tabel 2.24. Produktivitas Ternak Kabupaten Temanggung	91
Tabel 2.25. Produktivitas Ternak Unggas	93
Tabel 2.26. Presentase Kelahiran Pedet	95
Tabel 2.27. Capaian Persentase Penanganan penyakit Hewan	96
Tabel 2.28. Laporan Jumlah Kasus	96
Tabel 2.29. Sampel Organ Hati.....	100
Tabel 2.30. Capaian Kinerja TW I 2024	101
Tabel 2.31. Capaian Kinerja TW I Tahun 2023	102
Tabel 2.32. Jumlah Kelompok tani yang naik kelas TW I Tahun 2024	104
Tabel 2.33. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025....	111
Tabel 2.34. Usulan program dan kegiatan masyarakat	122
Tabel 2.35. Daftar Inovasi Perangkat daerah 2021-2023	122
Tabel 2.36. Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	123
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan	

keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025...	126
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2025	132
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2025.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan..... 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

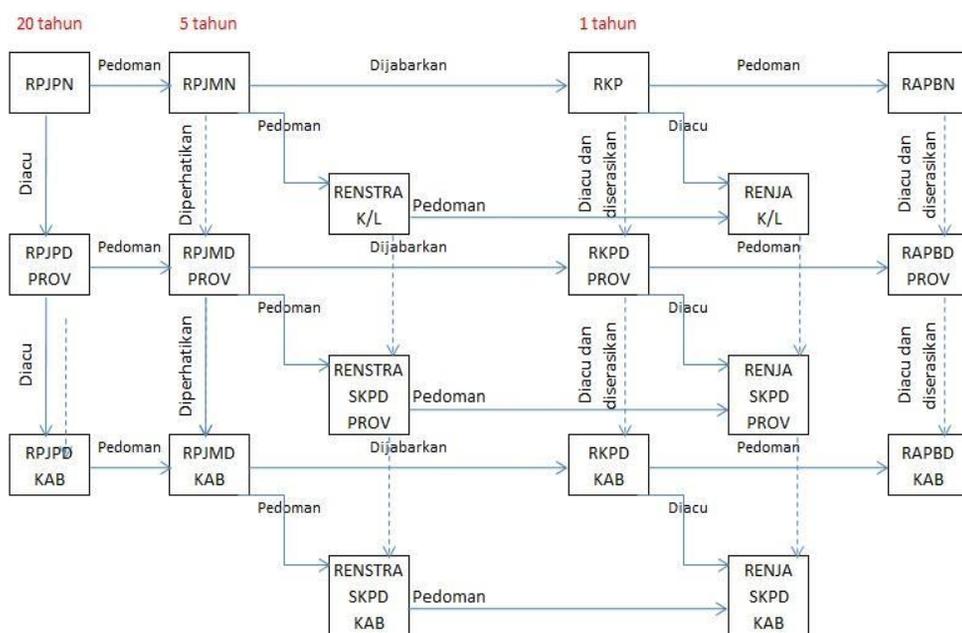
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada

hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang

diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan .

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DKPPP untuk kondisi tahun 2024-2026;

- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DKPPP.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DKPPP. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DKPPP dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DKPPP tahun-tahun sebelumnya,

untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DKPPP;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DKPPP;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DKPPP sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DKPPP tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DKPPP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DKPPP;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DKPPP;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DKPPP;

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DKPPP.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DKPPP.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DKPPP.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DKPPP merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Penyempurnaan rancangan Renja DKPPP perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja

DKPPP dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DKPPP dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DKPPP yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DKPPP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DKPPP Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi DKPPP Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DKPPP untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKPPP.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DKPPP Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DKPPP selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DKPPP Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DKPPP Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DKPPP Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DKPPP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DKPPP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DKPPP Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja DKPPP Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DKPPP Tahun 2023 terhadap capaian Renstra DKPPP Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DKPPP sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024**, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKPPP
s.d Tahun 2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
					K	R P	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	1				-	23.994.16 2.604	25	4.988.26 0.645		7.712.991 .604		5.224.09 1.997		5.793.115 .713	25, 00	23.718.4 59.959		98, 85	
				%			100	25		25		25		25		100		100		
2.09.01																				
2.09.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.676.72 9.564		4.557.45 1.448		7.258.434 .690		4.698.43 3.567		4.935.800 .070		21.450.1 19.775		98, 95	
2.09.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan			14 21.676.729 .564	3	4.557.45 1.448	5	7.258.434. 690	3	4.698.433 .567	3	4.935.800. 070	14,0 0	21.450.11 9.775	100	100	
2.09.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						188.481.1 00		21.329.6 35		46.249.09 9		59.176.2 40		60.105.56 0		186.860. 534			
2.09.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			12 14.057.600	3	3.680.00 0	3	4.168.050	3	1.998.000	3	4.205.790	12,0 0	14.051.84 0	100, 00	99,9 6	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	R P	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.09.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			12	50.000.000	3	6.609.00 0	3	12.857.50 0	3	18.331.50 0	3	12.060.30 0	12,0 0	49.858.30 0	100, 00	99,7 2
2.09.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12	10.000.000	3	285.000	3	1.150.000	3	4.215.000	3	4.307.500	12,0 0	9.957.500	100, 00	99,5 8
2.09.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n			12	49.424.000	3	6.317.00 0	3	7.785.500	3	14.541.00 0	3	20.621.30 0	12,0 0	49.264.80 0	100, 00	99,6 8
2.09.01.2 .06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n			12	64.999.500	3	4.438.63 5	3	20.288.04 9	3	20.090.74 0	3	18.910.67 0	12,0 0	63.728.09 4	100, 00	98,0 4
2.09.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.603.754. 150		377.325. 882		373.347.9 19		408.649. 480		410.406.8 49		1.569.73 0.130		
2.09.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n			12	1.000.000	3	500.000	3	500.000	3	-	3	-	12,0 0	1.000.000	100, 00	100, 00
2.09.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n			12	121.996.00 0	3	26.001.5 38	3	25.275.36 3	3	28.008.97 4	3	33.516.11 1,00	12,0 0	112.801.9 86	100, 00	92,4 6

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	R p	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.09.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n			12	1.480.758. 150,00	3	350.824. 344	3	347.572.5 56	3	380.640.5 06	3	376.890.7 38	12,0 0	1.455.928 .144	100, 00	98,3 2
2.09.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						525.197.7 90		32.153.6 80		34.959.89 6		57.832.7 10		386.803.2 34		511.749. 520		
2.09.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			12	139.999.00 0	3	12.265.8 30	3	20.521.89 6	3	31.667.01 0	3	68.232.98 6,00	12,0 0	132.687.7 22	100, 00	94,7 8
2.09.01.2 .09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit			12	354.999.69 0	3	15.782.8 50	3	9.858.000	3	22.139.20 0	3	301.243.2 48	12,0 0	349.023.2 98	100, 00	98,3 2
2.09.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit			12	30.199.100	3	4.105.000	3	4.580.000	3	4.026.500	3	17.327.000	12,0 0	30.038.500	100, 00	99,4 7

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	R p	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.09.04. 2.01	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						0		0		0		-		0		-		0,0
		Rasio lambung pangan masyarakat	%	56		52		58		58		58		58		58,00		100,00	
2.09.04.2 .01.01	Penyusunan pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan keentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokum en																
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				0		20.000.00 0		0		1.443.500		16.220.5 00		1.956.000		19.620.0 00		98, 10
		Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90		90		100		-	100, 00		10 0		98, 82		100		100, 00
2.09.05. 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kot a						20.000.00 0		0		1.443.500		16.220.5 00		1.956.000		19.620.0 00		98, 10
2090520 101	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kot a	KelembagaanK eamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Ko ta yang Dibina	Dokum en																

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023						
				K	R P	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
2.09.05.2 .01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	20.000.000	0	-	0,6	1443500	0,2	16.220.500	0,20	1.956.000,00	1,00	19.620.000	100	98,10					
																				Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	98,10		
																					Predikat	Sangat tinggi		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1			0		113.000.000		3.876.900		32.783.700		65.739.700		3.880.800		106.281.100					94,05		
			%	30,00		30		8,26		8,26		21,56		36,7		36,70		100,00						
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						113.000.000		3.876.900		32.783.700		65.739.700		3.880.800		106.281.100							
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Bulan			1	113.000.000	0,2	3.876.900	0,2	32.783.700	0,4	65.739.700	0,20	3.880.800	1,00	106.281.100	100,00				94,05		
																						Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	94,05
																							Predikat	Sangat tinggi

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
					K	R p	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1					2.085.333. 000		14.948.0 00		1.847.647 .305		43.183.2 00		98.728.70 0		2.004.50 7.205		96, 12	
			Produktivitas ikan nila	kg/m2	6,2 0	6,2		6,1 4		6,1 6		6,1 9		6,2 0		6,2 0		100 ,00		
			Produktivitas ikan lele	kg/m2	13, 80	13, 8		10, 76		13, 23		13, 42		13, 80		13, 80		100 ,00		
			Produktivitas ikan mas	kg/m2	6,0 0	6		5,6 2		5,8 9		5,9 1		6,0 0		6,0 0		100 ,00		
3.25.04. 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan n Ikan						2.085.333. 000		14.948.0 00		1.847.647 .305		43.183.2 00		98.728.70 0		2.004.50 7.205		96, 12	
3.25.04.2 .04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																			
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelomp ok																
3.25.04.2 .04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Unit		1	2.075.333. 000	0,2	8.880.50 0	0,4	1.847.647. 305	0,2	39.713.20 0	0,20	98.266.20 0	1,00	1.994.507 .205	100, 00	96,1 1	
3.25.04.2 .04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Unit		12	10.000.000	0,5	6.067.50 0	0	0	0,4	3.470.000	0,10	462.500	1,00	10.000.00 0	100, 00	100, 00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023			
					K	R P	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	98,05
																		Predikat		Sangat tinggi
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1				0	0													
			Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	33,00	33,00		45		45		45		45		45			100,00	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	
																		Predikat		Sangat tinggi
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1					513.783.000		0		0		166.482.761		318.560.112		485.042.873		100,00	94,41
			Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100,00	100		100		100		100		100		100			100,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a						513.783.000		0		0		166.482.761		318.560.112		485.042.873			94,41

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023			
				K	R P	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
3.25.06.2 .03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha				513.783.000	0,2	-		0	0,6	166.482.761	0,20	318.560.112	1,00	485.042.873	100,00	94,41		
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	94,41
																			Predikat		Sangat tinggi
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1			0		24.447.920.649		85.425.727		12.424.153.350		6.255.636.547		4.970.356.794		23.735.572.418				
			Produktivitas padi	kwintal /ha	63,30		63,30		63,15		63,15		63,15		63,46		63,46		100,00		
			Produktivitas jagung	kwintal /ha	46,00		46,00		46,10		46,10		46,1		46		46,00		100,00		
			Produktivitas Ubi Kayu	kwintal /ha	339,80		339,80		340,00		340,00		340		339,96		339,96		100,00		
			Produktivitas bawang putih	kwintal /ha	79,6		79,60		69,14		70,99		70,94		71,41		71,41		89,71		
			Produktivitas bawang merah	kwintal /ha	80,15		80,15		76,45		75,27		75,31		76,65		76,65		95,63		
			Produktivitas cabai rawit	kwintal /ha	55,00		55,00		20,41		27,31		73,43		75,50		75,50		100,00		
			Produktivitas cabai besar	kwintal /ha	69,50		69,50		19,62		27,93		74,99		77,53		77,53		100,00		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	R p	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Produktivitas tembakau	kwintal / ha	6,80		6,80		6,68		6,68		6,68		6,56		6,56		96,48	
		Produktivitas kopi robusta	kwintal / ha	7,25		7,25		6,93		6,93		4,67		6,53		6,53		90,13	
		Produktivitas kopi arabika	kwintal / ha	7,00		7,00		5,90		5,90		4,56		5,75		5,75		82,19	
		Produktifitas Cengkeh	kwintal / ha	2,45		2,45		4,17		4,17		2,83		2,83		2,83		100,00	
		Produktivitas Vanili	kwintal / ha	2,95		2,95		3,02		3,02		3,02		2,96		2,96		100,00	
		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,60		177,60		177,45		177,60		17,76		177,60		177,60		100,00	
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,71		13,71		13,70		13,71		13,71		13,71		13,71		100,00	
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,71		13,71		13,70		13,71		13,71		13,71		13,71		100,00	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		100,00	
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,88		10,88		2,72		5,44		8,16		10,88		10,88		100,00	
		Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,70		0,70		0,70		0,70		0,70		0,70		0,70		100,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						18.360.420.649		78.964.727		12.408.247.500		2.774.639.247		2.437.795.494		17.699.646.968		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)	TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		
						K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	1					9.336.133. 700		16.358.9 86		3.914.579 .979		3.215.28 6.128		2.132.021 .897		9.278.24 6.990		99, 38	
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76, 55		76, 5		79, 15		79, 15		79, 15		79,1 5		79, 15		-	100
3.27.03. 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						9.336.133. 700		16.358.9 86		3.914.579 .979		3.215.28 6.128		2.132.021 .897		9.278.24 6.990			
3.27.03.2 .02.01	Pembangunan,R ehabilitasi danPemeliharaa an JaringanIrigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit			4.945.600. 000,00	0,2	10.075.1 90	0,15	1.780.599. 785	0,1 5	1.123.044 .731	0,5	2.005.549. 529	1	4.919.269 .235	100, 00	99,4 7	
3.27.03.2 .02.02	Pembangunan,R ehabilitasi danPemeliharaa an EmbungPertani an		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			480.000.00 0	0,1	-	0,6	288.000.0 00	0,3	192.000.0 00	0	-	1	480.000.0 00	100, 00	100, 00	
3.27.03.2 .02.03	Pembangunan,R ehabilitasi danPemeliharaa an JalanUsaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			2.897.333. 900	0,1	3.141.89 8	0,4	1.692.715. 147,00	0,2	1.137.002 .269	0,3	50.794.93 7,00	1	2.883.654 .251	100, 00	99,5 3	
3.27.03.2 .02.09	Pembangunan,R ehabilitasi danPemeliharaa an PrasaranaPerta nian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			1.013.199. 800,00	0,08	3.141.89 8	0,2	153.265.0 47	0,6	763.239.1 28	0,12	75.677.43 1	1	995.323.5 04	100, 00	98,2 4	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		
				K	R p	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1					325.575.0 00		5.194.00 0		32.493.87 7		164.503. 200		111.056.2 39		313.247. 316		96, 21	
		Persentase penanganan penyakit hewan	%	90		85		95, 95		96, 94		96, 6		97,2 6		97, 26		100 ,00		
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70		70		80, 73		82, 93		84, 01		82,1		82, 10		100 ,00		
3.27.04. 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kot a						175.000.0 00		4.577.50 0		25.789.25 0		50.093.9 50		83.239.86 6		163.700. 566		93, 54	
3.27.04.2 .01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Lapora n			1	175.000.00 0,00	0,05	4.577.50 0	0,20	25.789.25 0	0,3 0	50.093.95 0	0,5	83.239.86 6,00	1,00	163.700.5 66	100, 00	93,5 4	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		
				K	R P	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3.27.04. 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kot a						150.575.0 00		616.500		6.704.627		114.409. 250		27.816.37 3		149.546. 750			
3.27.04.2 .03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Lapora n			1	150.575.00 0	0,1	616.500	0,2	6.704.627	0,4	114.409.2 50	0,3	27.816.37 3,00	1,00	149.546.7 50	100, 00	99,3 2	
																	Rata- rata capaian kinerja kegiatan	100 ,00	96, 43	
																	Predikat		Sangat tinggi	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN						400.000.0 00		0		43.259.25 0		151.295. 210		203.179.0 20		397.733. 480		99, 43	
								40, 3		40, 25		13, 78		10,7 4		40, 62		40, 62	100 ,00	
3.27.05. 2.01	Pengendalian dan Penanggulan n Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a						400.000.0 00		-		43.259.25 0		151.295. 210		203.179.0 20		397.733. 480		99, 43	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	R P	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.27.05.2 .01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha			1	400.000.000	0,2	-	0,2	43.259.250	0,2	151.295.210	0,4	203.179.020,00	1,00	397.733.480	100,00	99,43
3.27.05.2 .01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha																
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00	99,43
																	Predikat	Sangat tinggi	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						4.480.895.800		38.376.800		1.751.788.700		227.328.593		2.111.342.025		4.128.836.118		92,14
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	0,83			1,03		1,48		1,48		1,48		1,48		100,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						4.480.895.800		38.376.800		1.751.788.700		227.328.593		2.111.342.025		4.128.836.118		92,14

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTR A (2023)		TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	R p	K	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							2									PREDIKAT		San gat ting gi	Tin ggi
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		99, 34	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
s.d Triwulan I Tahun 2024

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
					K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1				-		25.478.820.754		4.828.441.924	0,00	4.828.441.924		18,95
				%			100		25		25,00		25,00	
2.09.01														
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23.029.388.994		4.364.025.612		4.364.025.612		18,95
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			14	23.029.388.994	3	4.364.025.612	3,00	4.364.025.612	21,43	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							193.500.000		25.557.019		25.557.019		13,21
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			12	20.000.000	3	-	3,00	-	25,00	0,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			12	60.000.000	3	9.408.000	3,00	9.408.000	25,00	15,68
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12	13.500.000	3	1.510.000	3,00	1.510.000	25,00	11,19
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	50.000.000	3	6.731.000	3,00	6.731.000	25,00	13,46

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	R P	K	Rp(DPA)		Rp	K	Rp	K	Rp
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	50.000.000	3	7.908.019	3,00	7.908.019	25,00	15,82
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.940.931.760		394.230.968		394.230.968		20,31
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			12	1.000.000	3	-	3,00	-	25,00	0,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	140.000.000	3	29.923.031	3,00	29.923.031	25,00	21,37
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	1.799.931.760,00	3	364.307.937	3,00	364.307.937	25,00	20,24
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.000.000		44.628.325		44.628.325		14,17
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			12	140.000.000	3	36.153.325	3,00	36.153.325	25,00	25,82
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			12	150.000.000	3	-	3,00	-	25,00	0,00

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	R P	K	Rp(DPA)		Rp	K	Rp	K	Rp
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			12	25.000.000	3	8.475.000	3,00	8.475.000	25,00	33,90
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			24,70	18,65
									Predikat			Sangat tinggi	Sedang
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					0			0		0		
		Rasio ketersediaan pangan	%	100	100			177,4		177,40		100,00	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan				
									Predikat				
2.09.04.2.01	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					0			0		-		0,00
		Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100			100		100,00		100,00	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan				
									Predikat				
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				0	0			0		-		#DIV/0!
		Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90			100		100		100,00	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan				
									Predikat				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
					K	R P	K	Rp(DPA)		Rp	K	Rp	K	Rp
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						150.000.000		136.817.000		136.817.000			
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1				0	0		0		-			#DIV/0!
			Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30,00		30		4,59		4,59		15,29	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1				0	150.000.000		136.817.000		136.817.000			91,21
			Produktivitas ikan nila	kg/m2	6,20		1,2		1,21		1,21		100,00	
			Produktivitas ikan lele	kg/m2	13,80		12,6		12,5		12,50		99,21	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						150.000.000		136.817.000		136.817.000			91,21
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok			140.000.000	98,34	136.817.000	98,34	136.817.000		98,34	97,73
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan													
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit			12	10.000.000	47,15	-	47,15	-	47,15	0,00
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan			72,75	97,73
										Predikat			Sangat tinggi	Sangat tinggi
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1				0	0		0		-			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	R P	K	Rp(DPA)		Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	33,00		10		45		45		100,00	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan				
									Predikat				
3.27 URUSAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						26.296.332.043		51.071.250				0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1			0		17.007.101.143		18.707.250		18.707.250		0,11
		Produktivitas padi	kwintal/ha	61,75		61,25		61,6		61,60		100,00	
		Produktivitas jagung	kwintal /ha	54,7		54,5		56,9		56,90		100,00	
		Produktivitas bawang putih	kwintal/ha	61,25		60,5		65		65,00		100,00	
		Produktivitas bawang merah	kwintal /ha	70		68		76		76,00		100,00	
		Produktivitas cabai rawit	kwintal /ha	51		50		75		75,00		100,00	
		Produktivitas cabai besar	kwintal /ha	66		65		76		76,00		100,00	
		Produktivitas tembakau	kwintal/ ha	6,2		6,2		6,56		6,56		96,48	
		Produktivitas kopi robusta	kwintal/ ha	7,2		7,1		6,53		6,53		90,13	
		Produktivitas kopi arabika	kwintal/ ha	6,5		6,5		6,5		6,50		82,19	
		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,6		177,4		177,6		177,60		100,00	
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,72		13,7		13,71		13,71		100,00	
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,72		13,7		13,71		13,71		100,00	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75		0,75		0,75		0,75		100,00	
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,88		10,88		2,72		2,72		25,00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	R P	K	Rp(DPA)		Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase angka kelahiran pedet	Kg/Ekor	56,5		55,5		166,2		166,20		100,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						14.542.101.143		11.843.500		11.843.500		
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan			1	13.057.201.143	10	10.178.500	10,00	10.178.500	10,00	0,08
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan			1	1.484.900.000	5	1.665.000	5,00	1.665.000	5,00	0,11
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						2.465.000.000		6.863.750		6.863.750		
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB				25.000.000	15	825.500	15,00	825.500	15,00	3,30
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen			1	2.440.000.000,00	5	6.038.250	5,00	6.038.250	5,00	0,25
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			8,75	0,93
									Predikat			Sangat rendah	Sangat rendah
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				0		8.317.730.900		0		-		0,00
		Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	100		100				0,00	-	-	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						8.317.730.900		0		-		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	R P	K	Rp(DPA)		Rp	K	Rp	K	Rp
3.27.03.2.02.01	Pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan JaringanIrigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit				5.059.415.000,00	8		8	-	8,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan JalanUsaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit				844.105.000	8	-	8	-	8,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaPertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit				355.000.000	2	-	2	-	2,00	0,00
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit				2.059.210.900	15		15,00	-	15,00	0,00
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			8,25	#DIV/0 !
									Predikat			Sangat rendah	#DIV/0 !
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1			0		721.500.000		8.068.000		8.068.000		1,12
		Persentase penanganan penyakit hewan	%	89		85		95,8		95,80		100,00	
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	79		70		85,23		85,23		100,00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	R P	K	Rp(DPA)		Rp	K	Rp	K	Rp
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000		4.271.000		4.271.000		8,54
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan			1	50.000.000,00	10,00	4.271.000	10,00	4.271.000	10,00	8,54
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						671.500.000		3.797.000		3.797.000		0,57
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan			1	671.500.000	5	3.797.000	5,00	3.797.000	5,00	0,57
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			7,50	3,22
									Predikat			Sangat rendah	Sangat rendah
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1					0		0		-		#DIV/0!
		Persentase fasilitas pengendalian bencana pertanian	%	43		41		109,29		109,29		100,00	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan				
									Predikat				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1					250.000.000		24.296.000		24.296.000		9,72
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	1,3		1,3		1,48		1,48		100,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						250.000.000		24.296.000		24.296.000		9,72

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)		TARGET 2024		REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	R P	K	Rp(DPA)		Rp	K	Rp	K	Rp
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit			1	250.000.000	15	24.296.000	15,00	24.296.000	15,00	9,72
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan		15,00	9,72	
									Predikat		Rendah	Sangat rendah	
		Jumlah					51.925.152.797		5.016.330.174		5.016.330.174		
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		22,82	#DIV/0!	
							2		PREDIKAT		Sangat tinggi	#DIV/0!	
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH				
									PREDIKAT		Tercapai		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra DKPPP Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DKPPP di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DKPPP berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan;
 - b. Tingkat Ketersediaan Energi per kapita;
 - c. Tingkat Ketersediaan Lemak per Kapita;
 - d. Tingkat Konsumsi Ikan.
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
 - a. Persentase Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan;
 - b. Rasio Lumbung Pangan Masyarakat;
 - c. Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman;
 - d. Persentase Nelayan Perairan Umum Yang Terbina;
 - e. Produktivitas Ikan Nila;
 - f. Produktivitas Ikan Lele;
 - g. Produktivitas Ikan Mas;
 - h. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan;
 - i. Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan;
 - j. Produktifitas Padi;
 - k. Produktifitas Jagung;
 - l. Produktifitas Ubi kayu;
 - m. Produktivitas cabai rawit;
 - n. Produktivitas cabai besar;
 - o. Produktifitas Cengkeh;

- p. Produktivitas Vanili;
 - q. Produktivitas ternak sapi;
 - r. Produktivitas ternak domba;
 - s. Produktivitas ternak kambing;
 - t. Produktivitas ternak ayam ras pedaging;
 - u. Produktivitas ternak ayam ras petelur;
 - v. Produktivitas ternak ayam buras;
 - w. Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama;
 - x. Persentase penanganan penyakit hewan;
 - y. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat;
 - z. Persentase pengendalian bencana pertanian;
 - aa. Persentase kelompok tani yang naik kelas;
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- m. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
- o. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- q. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- r. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
- s. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
- t. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;
- u. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
- v. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
- w. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- x. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
- y. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
- z. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

- aa. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - bb. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - cc. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - dd. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - ee. Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota.
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
 5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Tingkat Ketersediaan Protein
 6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
 - a. Produktivitas bawang putih;
 - b. Produktivitas bawang merah;
 - c. Produktivitas tembakau;
 - d. Produktivitas kopi robusta;
 - e. Produktivitas kopi arabica;
 7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DKPPP. Merumuskan suatu kebijakan atau

tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa DKPPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **99,82**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Sasaran PD (renstra PD)	Persentase Realisasi Kinerja
1.	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	100%
2.	Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%
3.	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	100%
4.	Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	100%
5.	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	100%
7.	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	100%
8.	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%
9.	Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	97,45%

10.	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%
11.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%
12.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%
13.	Meningkatnya penyuluhan pertanian	100%
	Rata-rata	99,82

Dari Tabel 2.1. dan Tabel 2.2 Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DKPPP dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DKPPP Triwulan I Tahun 2024
Kabupaten Temanggung

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)															
		1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,5	78,5	78,7	79	93,5			100	T		
INDIKATOR PROGRAM															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1	Rasio ketersediaan pangan	%	100	100	100	100	177,4			100	T		
				jumlah beras yang tersedia (kg)				25.598.443,52							
				jumlah penduduk				817.483,00							
				indeks konsumsi beras perkapita perhari				0,194							
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	na	100	100	100	100			100	T		
				jumlah kerawanan pangan yang tertangani				20							
				jumlah total laporan kerawanan pangan				20							
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	3	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90	90	100			100	T		
				Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman				43							
				jumlah sampel yang diambil				43							
JUMLAH IKUPD		1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD									100	1	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		3	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM									100	3	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG PANGAN		4	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PANGAN									100	4	0	0

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN															
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)															
		1	Nilai Produksi Perikanan	Ribu Rp		349,364	349,5	349,638	121.228.375			100	T		
				Nilai Produksi ikan budidaya											
				Nilai Produksi ikan tangkap dalam 1 tahun											
INDIKATOR PROGRAM															
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30	10	10	10	4,59			100	T		
				jumlah nelayan terbina			50								
				jumlah nelayan			1090								
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	Produktivitas ikan nila	kg/m2	6	1,2	1,3	1,4	1,21			100	T		
				Jumlah produksi ikan nila (kg)			1.001.622								
				luas kolam (m2)			824.485								
		3	Produktivitas ikan lele	kg/m2	14	12,6	12,7	12,8	12,50			100	T		
				Jumlah produksi ikan lele (kg)			1.537.436								
				luas kolam (m2)			123.023								
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan	4	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33	10	10	10	20,69			100	T		
				jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun n			6								

				jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun n-1					29						
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	na	22,08	22,52	22,97	21,78			100	T		
				Jumlah konsumsi di Rumah Tangga											
				Jumlah Konsumsi diluar rumah tangga											
				Konsumsi tidak tercatat											
JUMLAH IKUPD			1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD								100	1	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			5	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM								100	5	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG PERIKANAN			6	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERIKANAN								100	6	0	0
C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)															
		1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	22,94	23,38	23,3	23,25	22,94			100	T		
				Jumlah PDRB Sektor Pertanian					6174016,36						
				Jumlah PDRB					26912324,21						
INDIKATOR PROGRAM															
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Produktivitas padi	Kuintal/ha	63,3	61,25	61,5	61,75	61,6			100	T		
				Total Produksi					465.088,00						
				luas panen					7.551,40						
		2	Produktivitas jagung	Kuintal/ha	46	54,5	54,6	54,7	56,9			100	T		
				Pembilang					183.536,00						

			Penyebut					3.227,00						
3	Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	79,6	60,5	61	61,25	65			100	T			
		Total Produksi					43355							
		luas panen					667							
4	Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	80,15	68	69	70	76			100	T			
		Total Produksi					112404							
		luas panen					1479							
5	Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	55	50	50,5	51	75			100	T			
		Total Produksi					127050							
		luas panen					1694							
6	Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	69,5	65	65,5	66	76			100	T			
		Total Produksi					70528							
		luas panen					928							
7	Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6,8	6,2	6,2	6,2	6,56			100	T			
		Total Produksi					96857,3							
		luas panen					14764,05							
8	Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	7,25	7,1	7,15	7,2	6,53			100	T			
		Total Produksi					84.769,00							
		luas panen					12972,2							
9	Produktivitas kopi arabika	Kuintal/ha	7	6,5	6,5	6,5	5,75			100	T			
		Total Produksi					9924,34							
		luas panen					1724,95							
10		Kg/Ekor	177,6	177,4	177,5	177,6	177,6			100	T			

		Produktivitas ternak sapi	Jumlah produksi karkas sapi pertahun				133.003,00						
			Jumlah sapi dipotong pertahun				787						
			konstanta				8,6						
11	Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,71	13,7	13,71	13,72	13,71			100	T		
			Jumlah produksi karkas domba pertahun				4.293,00						
			jumlah domba dipotong pertahun				318						
			konstanta				0,21						
12	Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,71	13,7	13,71	13,72	13,71			100	T		
			Jumlah produksi karkas kambing pertahun				1.215,00						
			jumlah kambing dipotong pertahun				90						
			konstanta				0,21						
13	Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			100	T		
			Jumlah produksi karkas ayam pedaging pertahun				1.543.594,00						
			jumlah ternak dipotong pertahun				2.058.125,00						
14	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,88	10,88	10,88	10,88	2,72			100	T		
			Jumlah produksi ayam petelur pertahun				2.053.792,97						
			Jumlah populasi ternak pertahun				755.030						
15	Persentase kelahiran pedet	%	na	55,5	56	56,5	166,2			100	T		
			JUmlah Aseptor IB				733						
			Jumlah Kelahiran Pedet				441						

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	na	100	100	100	100			100	T		
				Jumlah Prasarana yang dimanfaatkan			59								
				Jumlah prasarana yang dibangun			59								
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	17	Persentase penanganan penyakit hewan	%	90	85	87	89	95,80			100	T		
				Jumlah Penanganan Kasus Penyakit Hewan			319								
				Jumlah laporan kasus penyakit hewan			333								
		18	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	75	77	79	85,23			100	T		
				Jumlah usaha produk hewan yang memenuhi syarat			375								
				jumlah usaha produk hewan dan produk asal hewan yang dipantau			440								
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	19	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	na	41	42	43	109,29			100	T		
				Jumlah luasan tertangani			204,7								
				Jumlah luasan terpapar			187,302								
5	Program Penyuluhan Pertanian	20	Presentase Kelompok Tani yang naik kelas	%	0,98	1,3	1,3	1,3	1,48			100	T		
				Jumlah Kelompok tani naik kelas			40								
				Total Jumlah Kelompok tani			2709								

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK
	JUMLAH IKUPD		1			RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						100	1	0	0
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		20			RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						100	20	0	0
	JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG PERTANIAN		21			RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERTANIAN						100	21	0	0
	JUMLAH IKUPD		5			RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						100	3	0	0
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		28			RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						100	28	0	0
	JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH		33			RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH						100	31	0	0

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 28 terdiri dari:

a. Rasio ketersediaan pangan.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Perubahan iklim menjadi kendala dalam proses budidaya pertanian serta masih kurangnya pengetahuan dan sarana prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan di tingkat masyarakat
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan produksi pangan, peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perbaikan pengelolaannya untuk menjamin kualitas bahan pangan sesuai standar.

b. Persentase penanganan kerawanan pangan

Faktor pendorong indikator ini adalah

1. Tersedianya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
2. Pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan
3. Adanya bantuan sara dan prasarana pertanian kepada kelompok tani
4. Potensi diversifikasi pangan lokal

Faktor penghambat indikator ini adalah

1. Ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, dimana lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas

2. Adanya iklim ekstrim memicu terjadinya pergeseran masa tanam/pola tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan
3. Keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor
4. Fluktuasi harga pangan
5. Foodloss dan waste yang tinggi

Rekomendasi tindak lanjut:

1. Pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin
2. Melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial
3. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat tentang menu pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
4. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan pelatihan olahan pangan berbahan baku lokal
5. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran, buah, umbi-umbian, peternakan kecil dan perikanan untuk ketersediaan pangan keluarga dan menambah pendapatan keluarga.
6. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan diversifikasi tanaman pada kelompok tani, untuk meningkatkan

pendapatan kelompok tani dengan optimalisasi lahan pertanian sehingga dapat menambah produksi yang akhirnya menambah pendapatan.

c. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan pestisida non kimiawi untuk budidaya pertanian khususnya pangan segar asal tumbuhan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih terdapat petani dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan harus diimbangi dengan pemakaian pupuk kimia di luar ambang batas dan untuk menjamin hasil panen bebas hama, termasuk ulat, pestisida juga digunakan secara tidak bertanggung jawab, sarana uji tes yang kurang
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan edukasi dan alih teknologi tentang penggunaan dan pembuatan pestisida non kimiawai untuk pelaku budidaya pertanian khususnya PSAT.

d. Persentase nelayan perairan umum yang terbina

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi dimaksud dan hanya bisa dilaksanakan pada saat penebaran benih ikan di perairan umum
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pembuatan Perdes dan papan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan serta sanksi yang diberikn
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pembuatan Perdes dan papan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan serta sanksi yang diberikan

e. Produktivitas ikan nila

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah intensifikasi budidaya belum maksimal karena, kualitas pakan menurun(harga pakan cenderung terus naik), kualitas benih yang tidak stabil, Kualitas air yang menurun, tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar, perubahan iklim mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ikan (meningkatkan serangan penyakit)
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penerapan pola tanam dengan penjadwalan tebar benih dan kegiatan panen secara terukur, tidak melebihi kebutuhan pasar dan penerapan 4 T (Tepat mutu, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu)

f. Produktivitas ikan lele

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah intensifikasi budidaya belum maksimal karena, kualitas pakan menurun(harga pakan cenderung terus naik), kualitas benih yang tidak stabil, Kualitas air yang menurun, tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar, perubahan iklim mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ikan (meningkatkan serangan penyakit)
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penerapan pola tanam dengan penjadwalan tebar benih dan kegiatan panen secara terukur, tidak melebihi kebutuhan pasar dan penerapan 4 T (Tepat

mutu, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu)

g. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran masyarakat akan restocking ikan di perairan umum dengan mengajukan proposal untuk penebaran benih ikan di wilayahnya
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan ketersediaan benih untuk ditebar di perairan umum
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penambahan anggaran pengadaan benih ikan untuk ditebar di perairan umum dan sosialisasi kepada masyarakat untuk swadaya pengadaan benih ikan untuk ditebar di perairan umum

h. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Faktor Pendukung Indikator AKI adalah melaksanakan kegiatan:

- a. Sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) pada masyarakat
- b. Penyaluran bantuan sarana dan prasara pengolahan kepada Poklahsar untuk meningkatkan produksi

Faktor Penghambat Indikator AKI adalah:

- a. Rendahnya minat konsumsi ikan segar pada Masyarakat
- b. Tingginya harga bahan baku olahan ikan dan turunnya daya beli masyarakat

Rekomendasi Tindak Lanjut Indikator AKI:

- a. Diversifikasi produk olahan ikan yang dilakukan oleh Poklahsar
- b. Menjalinkan kerjasama dengan warung/ toko dan sekolah berasrama /pondok pesantren untuk pemasaran produk, bahan baku diambil langsung dari pembudidaya

i. Produktivitas padi

Faktor pendorong indikator tersebut adalah iklim tahun ini sudah tidak lagi diwarnai El Nino seperti tahun 2023, juga sinergi program yang mendukung peningkatan produksi pangan, seperti peningkatan kuota pupuk subsidi, pelaksanaan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ketersediaan air (pompanisasi).

Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum semua petani menggunakan varietas unggul baru dan benih berlabel, penggunaan benih lokal masih cukup tinggi.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan kesadaran petani dalam penggunaan varietas unggul baru, melaksanakan budidaya yang baik dan benar, melaksanakan kampanye tanam padi.

j. Produktivitas jagung

Faktor pendorong indikator tersebut adalah iklim tahun ini sudah tidak lagi diwarnai El Nino seperti tahun 2023, juga sinergi program yang mendukung peningkatan produksi pangan, seperti peningkatan kuota pupuk subsidi, bantuan benih jagung hibrida yang dilaksanakan pada awal tahun 2024.

Faktor penghambat indikator tersebut adalah meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (hama ulat) pada fase vegetatif tanaman jagung seiring dengan masuk musim kemarau.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan berpedoman pada prinsip pengendalian hama terpadu (hayati, mekanis dan kimia).

k. Produktivitas bawang putih

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kegiatan bantuan dari Pemerintah dalam menciptakan kemadirian pangan untuk komoditas hortikultura baik itu melalui APBN maupun APBD. Dan penerapan Teknologi budidaya (GAP, GHP) yang semakin berkembang. kegiatan pemurnian benih bawang geol untuk memenuhi kebutuhan petani (varietas unggul asli temanggung)
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Produktifitas dipengaruhi oleh perubahan iklim, kualitas benih, terbatasnya stok benih unggul lokal, fluktuasi harga jual yang terlalu tinggi
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Adanya jaminan harga komoditas, melalui kerjasama semua pihak baik petani pemerintah maupun swasta.

l. Produktivitas bawang merah

Faktor Pendorong :

- 1) Adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang merah baik itu melalui APBN, APBD I dan APBD II
- 2) Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang
- 3) Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi

Faktor Penghambat :

- 1) Faktor iklim
- 2) Serangan OPT
- 3) Kualitas benih
- 4) Penanganan pasca panen yang belum benar
- 5) Adanya fluktuasi harga

Rekomendasi

- Adanya jaminan harga terutama pada saat panen raya, melalui kerjasama semua pihak baik petani, pemerintah maupun swasta.
- Diadakan pelatihan/bintek tentang GAP dan GHP untuk petani
- Adanya pelatihan/BIntek tentang penanganan pasca panen dan pengolahan pasca panen

m. Produktivitas bawang putih

Faktor Pendorong :

- Adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang putih baik itu melalui APBN, APBD II
- Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang
- Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi
- Adanya kegiatan pemurnian benih bawang geol (bawang lokal unggul Temanggung)

Faktor Penghambat :

- Faktor iklim
- Serangan OPT
- Kualitas benih
- Penanganan pasca panen yang belum benar
- Adanya fluktuasi harga
- Ketersediaan benih bawang geol yang masih terbatas
- Kurangnya penyerapan pasar untuk bawang putih lokal karena kalah dengan bawang impor

Rekomendasi

- Adanya jaminan harga dan penyerapan pasar terutama pada saat panen raya, melalui kerjasama semua pihak baik petani, pemerintah maupun swasta.

- Diadakan pelatihan/bintek tentang GAP dan GHP untuk petani
- Adanya pelatihan/BIntek tentang penanganan pasca panen dan pengolahan pasca panen

n. Produktivitas cabai rawit

Faktor Pendorong :

- 1) Adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang putih baik itu melalui APBN, APBD II
- 2) Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang
- 3) Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi

Faktor Penghambat :

- Faktor iklim
- Serangan OPT (terutama virus kuning dan antraknosa)
- Adanya fluktuasi harga yang sangat tinggi

Rekomendasi

- Adanya jaminan harga melalui kerjasama semua pihak baik petani, pemerintah maupun swasta.
- Diadakan pelatihan/bintek tentang GAP dan GHP untuk petani

o. Produktivitas cabai besar

Faktor Pendorong :

- 1) Adanya kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang putih baik itu melalui APBN, APBD II
- 2) Penerapan teknologi budidaya (GAP dan GHP) yang semakin berkembang
- 3) Kesadaran petani untuk membentuk kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi

Faktor Penghambat :

- 1) Faktor iklim
- 2) Serangan OPT (terutama virus kuning dan antraknosa)
- 3) Adanya fluktuasi harga yang sangat tinggi

Rekomendasi

- 1) Adanya jaminan harga melalui kerjasama semua pihak baik petani, pemerintah maupun swasta.
- 2) Diadakan pelatihan/bintek tentang GAP dan GHP untuk petani

p. Produktivitas tembakau

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sumber Daya Alam Kab. Temanggung, Kebijakan Pemda dan dukungan DBHCHT, dan budaya masyarakat
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah GAP belum diterapkan, budidaya blm efisienshg Produktifitas , Iklim (Cuaca dan Angin) tidak mendukung, GHP blm diterapkan Mutu belum optimal, dan Tata Niaga yang semrawut
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah efisiensi dalam budidaya, Peningkatan Produktifitas, Peningkatan Kualitas dan Mitigasi Iklim

q. Produktivitas kopi robusta

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Topo geografis mendukung, Sumber Daya Alam Kab. Temanggung , Kebijakan Pemda Kopi Temanggung, budaya masyarakat dan Brand Kopi Temanggung semakin dikenal
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Produktifitas dipengaruhi oleh iklim, Tanaman Sebagian sudah tua dan tidak produktif perlu peremajaan, Kurangnya Kegiatan untuk peningkatan produksi, serangan hama penyakit

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peremajaan Tanaman Kopi, Dukungan serta Fasilitasi Kegiatan PPHT Kopi, Sosialisasi GAP Budidaya, penerapan GHP dan GMP
- r. Produktivitas kopi arabika
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDA, Upaya Konservasi Lahan Susi Prau dan Kopi Arabika untuk menambah Pendapatan Petani daerah Tembakau
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Produktifitas dipengaruhi oleh iklim
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pengembangan Penanaman Kopi Arabika di Lereng Susi Prau, Dukungan serta Fasilitasi Kegiatan PPHT Kopi, Sosialisasi GAP Budidaya, penerapan GHP dan GMP
- s. Produktivitas ternak sapi
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya konsumsi daging sapi oleh masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg
- t. Produktivitas ternak domba
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya konsumsi domba oleh masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas umur 1 tahun

u. Produktivitas ternak kambing

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya konsumsi kambing oleh masyarakat
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas umur 1 tahun

v. Produktivitas ternak ayam ras pedaging

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya produksi, ketersediaan bibit ternak yang baik
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ketimpangan antara harga sapi/naak dengan harga penjualan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga

w. Produktivitas ternak ayam petelur

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Manajemen pemberian pakan yang baik, ketersediaan bibit ternak yang baik
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ketimpangan antara harga sapi/naak dengan harga penjualan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga

x. Persentase kelahiran pedet

- 1) Faktor pendorong: Kab Temanggung sebagai wilayah yang potensial utk pengembangan ternak sapi mengingat faktor geografis yang mendukung terutama

ketersediaan pakannya

- 2) Faktor penghambat:
 - a. Munculnya wabah penyakit PMK dan LSD 2 tahun terakhir mengakibatkan turunnya populasi sapi termasuk betina produktif sehingga jumlah akseptor menurun. Hal ini berkorelasi positif terhadap menurunnya kelahiran pedet 2 tahun terakhir.
 - b. Selain itu akseptor yang sudah di IB tidak dilaporkan kelahirannya dikarenakan sudah dijual dalam keadaan bunting, selain itu peternak tdk mengabari petugas inseminator jika pedetnya sudah lahir.
 - c. Banyak peternak sapi beralih ke beternak domba/kambing
- 3) Upaya pencapaian target: peningkatan dan optimalisasi reproduksi sapi betina produktif, pencegahan dan pengobatan gangrep

y. Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya
 Faktor Pendorong indikator tersebut adalah kebutuhan akan prasarana pertanian untuk mendorong peningkatan produksi pertanian

Faktor Penghambat Indikator tersebut

- 1) Prasarana pertanian tidak sesuai kriteria / syarat teknis
- 2) Manajemen pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak terencana (misal sudah dibangun irigasi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik)
- 3) Kurangnya kesadaran pribadi dalam mengelola aset kelompok / bersama

Rekomendasi tindak lanjut indicator tersebut

- 1) Verifikasi teknis
- 2) Pendampingan dan penyuluhan tentang pemanfaatan prasarana sesuai dengan fungsinya

z. Persentase penanganan penyakit hewan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah prasarana penanganan kasus berupa obat hewan, bahan/alat diagnostik dan alat kesehatan hewan

aa. Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran pelaku usaha untuk menjaga higienitas produk daging yang dihasilkan meningkat
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah lokasi pengawasan produk hewan dan menambah jumlah sampel produk yang diperiksa

bb. Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian

1) Faktor Pendorong indikator tersebut

- Ketersediaan bahan pengendali oleh dinas terkait
- Adanya laporan serangan OPT (organisme pengganggu tumbuhan)
- Kesiapsiagaan petugas dalam pengendalian OPT

2) Faktor Penghambat indikator tersebut

- Kurangnya pemahaman petani terkait pengendalian OPT (organisme pengganggu tumbuhan) secara terpadu
- Terbatasnya akses informasi petani terhadap fasilitasi pengendalian Bencana pertanian

3) Rekomendasi Tindak Lanjut Faktor Tersebut

- Meningkatkan kesadaran petani dalam pengendalian OPT secara terpadu melalui penyuluhan dan bimbingan teknis
- Memberikan sosialisasi kepada petani terkait fasilitasi pengendalian Bencana pertanian (bahan pengendali OPT , gerakan pengendalian)

cc. Persentase Kelompok Tani yang naik kelas

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam pembinaan kelompok tani
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah ada sebagian kelompok tani yang tidak aktif
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pembinaan secara kontinyu kepada kelompok tani
1. Capaian indikator dengan status upaya keras tidak ada.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada DKPPP terdiri dari 3 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pangan, Data Pokok Bidang Perikanan dan Data Pokok Bidang Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

A. BIDANG PANGAN

1. Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam

pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Rumus untuk memperoleh Skor Pola Pangan Harapan 2023 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2022. Skor PPH ideal adalah 100 yang menunjukkan keberagaman tingkat konsumsi pangan di suatu wilayah. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989). Perhitungan Skor PPH dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 (TW I)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024 TW I
Skor Pola Pangan Harapan	77.9	78.8	79.7	80,10 (100%)	93,5 (100%)	93,5 (100%)

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Tahun 2019-2024 mengalami peningkatan dari 77,9 menjadi 93,5. Capaian Tahun 2024 masih menggunakan capaian Tahun 2023 sebesar 93,5 atau sudah tercapai 100% dari target 78,5. Peningkatan ketersediaan pangan untuk menutupi defisit konsumsi pada dasarnya dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dalam negeri (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi maupun rehabilitasi) dan impor. Pengembangan komoditas sayuran dan buah hendaknya diarahkan pada pola jenis buah dan sayuran yang berbasis sumberdaya lokal seperti pisang, jeruk, pepaya serta sayuran hijau dan kacang-kacangan serta kelompok sayuran yang relatif tidak tergantung musim, mudah dibudidayakan dan daya terima masyarakat cukup tinggi terhadap komoditas tersebut.

Bentuk kegiatan yang harus dilakukan dalam merubah pola pikir masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman adalah :

1. Melakukan program peningkatan kebutuhan pangan melalui diversifikasi pangan melalui kegiatan :
 - a) Meningkatkan ketersediaan pangan ke

tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;

- b) Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi menu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, melalui kegiatan gerakan mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman;
 - c) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan;
 - d) Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan).
2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tetap stabil ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung, melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Data konsumsi dikumpulkan secara periodik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Bersamaan dengan data modul konsumsi, juga dikumpulkan data kor (pokok) sehingga perilaku konsumsi penduduk bisa dikaitkan dengan data sosial ekonomi lainnya. Data Susenas yang digunakan untuk dasar penghitungan Pola Pangan Harapan adalah Konsumsi penduduk Indonesia menurut Komoditi Bahan Makanan, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia yang dirumuskan dalam Angka Kecukupan kalori dan Protein

Tabel 2.6 Skor pola pangan harapan konsumsi pangan penduduk
Berdasarkan data survey sosial ekonomi nasional
Kabupaten Temanggung tahun 2024 TW I*

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal /Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	270,2	1.051	53,1	50,1	0,5	26,5	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	54,9	60	3,0	2,9	0,5	1,5	1,4	2,5	1,4
3	Pangan Hewani	84,0	230	11,6	10,9	2,0	23,2	21,9	24,0	21,9
4	Minyak dan Lemak	25,3	228	11,5	10,8	0,5	5,8	5,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	5,1	28	1,4	1,3	0,5	0,7	0,7	1,0	0,7
6	Kacang-kacangan	22,1	74	3,7	3,5	2,0	7,4	7,0	10,0	7,0
7	Gula	37,8	140	7,0	6,6	0,5	3,5	3,3	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	255,1	127	6,4	6,0	5,0	32,0	30,2	30,0	30,0
9	Lain-lain	67,6	44	2,2	2,1	-	-	-	-	-
	Total		1.981	100,0	94,3		100,7	95,0	100,0	93,5

Sumber : Susenas 2023 BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP

2. Rasio ketersediaan pangan

Rasio ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi bersih beras serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Rumus Rasio ketersediaan pangan adalah

$$\frac{\text{Jumlah beras yang tersedia} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk} \times \text{indeks konsumsi beras perkapita perhari} \times \text{hari}}$$

Jumlah beras yang tersedia dihitung dari GKG (gabah kering giling) x 64,02% (angka konversi nasional dalam perhitungan NBM 2022), dimana Indeks kebutuhan beras perkapita perhari sebesar 0,194 kg/kap/hr (data dari susenas 2023).

Perhitungan :

Total Produksi Padi per Triwulan I Tahun 2024 sebesar 465.088 kwintal x 0,86 = 399.975,68 kwintal GKG x 0,64= 255.984,4352 kw beras (25.598.443,52 kg beras)

Jumlah penduduk kabupaten Temanggung 817.483 jiwa

(data dari website dukcapil), kebutuhan beras perorang per kapita/hari = 0,194 kg/kap/hr, Jumlah hari dalam TW 1 adalah 91 hari sehingga kebutuhan beras = 14.431.844 kg/kap/hr

$$\text{Rasio ketersediaan pangan} = \frac{25.598.443,52 \text{ kg beras}}{14.431.844 \text{ kg/kap/hr}} \times 100\% = 177,4\%$$

Tabel 2.7 Capaian Rasio Ketersediaan Pangan Tahun 2024 TW

I

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ketersediaan Pangan	na	na	147,06	122,54 (100%)	133,42	177,4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai triwulan I rasio ketersediaan pangan tercapai 177,4%, target tercapat stok ketersediaan pangan aman.

Faktor pendorong ketersediaan pangan adanya peningkatan produksi gabah di TW I karena bersamaan dengan panen raya. Faktor penghambat ketersediaan pangan serangan hama, perubahan iklim.

3. Persentase Penanganan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi atas ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik. Penanganan Kerawanan pangan dilakukan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan

Rumus = $\frac{\text{Jumlah kerawanan pangan yang tertangani}}{\text{Jumlah total laporan kerawanan pangan}}$

Tabel 2.8 Capaian Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2024 TW I

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	na	na	na	na	na	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai triwulan I Persentase Penanganan Kerawanan Pangan tercapai 100%. Sesuai dengan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) di Kabupaten Temanggung yang terindikasi daerah rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3 ada 10 desa, namun kegiatan penanganan kerawanan pangan melalui kegiatan stabilisasi pangan dan harga pangan meliputi 20 Kecamatan dengan Gerakan Pangan Murah yang bertujuan memudahkan akses masyarakat terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

4. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman

Keamanan pangan secara definisi adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Kualitas dari bahan baku pangan olahan yang berasal dari pangan segar, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti residu pestisida dan obat-obatan terkait perlakuan on-farm pada saat budidaya, serta sifat genetik/kemungkinan transgenik.

Penanganan pasca panen yang kurang tepat, penyimpanan yang kurang memperhatikan sifat bahan pangan juga akan menurunkan mutu dan kualitas pangan. Demikian pula alat dan cara pengolahan pangan yang tidak tepat juga berpotensi mengurangi kandungan gizi, seperti

pemasakan yang terlalu lama, mengalami oksidasi, atau kurang higienenya peralatan yang digunakan juga dapat menimbulkan masalah apabila makanan tersebut dikonsumsi.

Akhir-akhir ini isu mengenai bahan tambahan pangan yang berbahaya juga menjadi bahasan utama di bidang keamanan pangan. Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan ini dapat berupa pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel pangan, sampai dengan TW I ada 43 sampel uji pestisida yang diperiksa dari pasar dengan hasil negative (target 2024 sebesar 90% realisasi 100% sehingga target tercapai 100%).

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman}}{100\% \times \text{jumlah sampel yang diambil}}$$

Tabel 2.9
Capaian Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman
Tahun 2019-2024 TW I

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	na	na	100	100	100	100

Tabel 2.10

Rekapitulasi Hasil Uji Pangan segar asal Tumbuhan Tahun 2019-2024
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kab Temanggung

No	Tahun	Jumlah sample	Jenis Sample	Hasil Tes
1	2019	na	-	-
2	2020	na	-	-
3	2021	55	Sayuran	negatif
4	2022	42	2 beras, 40 sayuran dan buah	negatif
5	2023	85	Sayuran dan buah	1 sample mengandung formalin
6	2024	43	sayuran	negatif

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah sample yang diuji pada tahun 2024 sebanyak 43 sample dengan hasil sample semua negatif (aman) target kinerja tercapai 100%.

B. BIDANG PERIKANAN

1. Nilai Produksi Perikanan

Nilai Produksi Perikanan adalah Nilai/Hasil produksi ikan hasil tangkapan nelayan baik didaratkan dipelabuhan maupun di non pelabuhan

Rumus = Nilai Produksi perikanan budidaya (Rp) +nilai produksi perikanan tangkap(Rp)

Tabel 2.11

Capaian Nilai Produksi Perikanan Tahun 2019-2024 TW I

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Produksi Perikanan	na	na	na	na	na	121.228.375

2. Produktivitas Ikan (Ikan Nila, Ikan lele)

Untuk mengukur peningkatan usaha budidaya ikan, selain dapat dilihat dari produksinya juga dilihat dari produktivitas. Produktivitas ikan nila dihitung dari produksi

ikan nila konsumsi (kg) dibagi luas kolam yang dipanen (m²). Yang dimaksud dengan ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan kolam air tenang adalah kolam dengan debit air sebesar 8 – 15 liter per detik.

Rumus penghitungan produktivitas perikanan :

$$\frac{\text{jumlah produksi}}{\text{luas lahan}}$$

Dengan satuan yang biasa digunakan adalah kg/m² atau ton/Ha. Untuk produktivitas kolam air tenang lebih sering digunakan satuan kg/m². Tingkat produktivitas dari masing-masing jenis komoditas ikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Tingkat Produktivitas Ikan (Budidaya) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2024 TW I

NO	JENIS DATA	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	IKAN NILA						
	Produksi (kg)	1.975.00 0	2.039.68 0	2.213.18 1	2.385.507	4.005.466	1.001.622
	Luas Lahan (m ²)	547.000	533.900	547.000	441.725	645.956	824.485
	Produktivitas (Kg/m ²)	3,61	3,82	4,05	5,40	6,20	1,21
2.	IKAN LELE						
	Produksi (kg)	4.210.74 0	4.711.35 0	4.914.56 2	4.912.234	5.553.005	1.537.436
	Luas Lahan (m ²)	437.100	447.800	456.800	389.731	402.350	123.023
	Produktivitas (Kg/m ²)	9,63	10,52	10,76	12,60	13,80	12,50

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Indikator produktivitas ikan nila dan lele tahun 2024 mengalami perubahan target (d disesuaikan dengan juknis dari kementerian kelautan dan perikanan), sehingga dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai TW I 2024 produktivitas ikan nila sebesar 1,21 kg/m² dan ikan lele 12,5 kg/m².

Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan budidaya, produksi benih ikan serta produksi perikanan tangkap. Ruang lingkup dalam produksi

perikanan budidaya adalah produksi ikan konsumsi di kolam air tenang, sawah dan karamba jaring apung.

Tabel 2.13 Produksi Ikan Konsumsi (Budidaya) di Kab Tmg Tahun 2019-2024 TW I

N O	JENIS DATA	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Ikan Konsumsi :	7.452.690	7.830.880	8.177.343,52	8.179.387,86	10.160.092,51	2.692.532,98
	Kolam air tenang (kg)						
	Prosentase peningkatan (%)	10,28	5,07	4,42	0,17		
2	Sawah (kg)	5.072.220	5.581.220	5.692.820,48	5.693.673,88	3.692.232,31	1.740.695,84
	Prosentase peningkatan (%)	20,04	10,04	2,00	0,25		
3	KJA (kg)	7.630	7.680	3.810,00	-	-	
	Prosentase peningkatan (%)	28,24	0,66	(50,39)	(100,00)	(100,00)	
	Jumlah		10.989.580	12.532.540	13.419.780	13.873.974	4.433.228,81

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya penerapan teknologi budidaya ikan berupa peningkatan padat tebar dan penggunaan pakan ikan yang berkualitas di kalangan pembudidaya ikan. Terdapat perubahan pola sistem budidaya ikan dari yang semula hanya panen 1 kali dalam 1 tahun menjadi 2 kali dalam 1 tahun. Selain itu, kenaikan produksi dipengaruhi oleh trend meningkatnya permintaan ikan konsumsi menjelang hari raya, sehingga banyak pembudidaya yang memanen ikan pada moment tersebut.

Akan tetapi pada mulai tahun 2022 ini Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Temanggung mengalami kerusakan parah, sehingga tidak ada hasil produksi dari KJA.

Beberapa kebijakan dan program dari pemerintah diharapkan membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang berimbas pada kembalinya siklus produksi perikanan,

sehingga bisa pulih seperti kondisi saat normal.

3. Persentase Nelayan Perairan Umum Terbina

Nelayan perairan umum atau RTP (Rumah Tangga Perikanan) adalah orang yang bermata pencaharian dengan menangkap ikan di perairan umum (meliputi sungai, cekdam/waduk, rawa atau genangan) yang sebagian atau seluruh hasil tangkapan tersebut dijual.

Pada tahun 2021 jumlah nelayan perairan umum di Kabupaten Temanggung adalah 1.090 orang. Adapun luas perairan umum di Kabupaten Temanggung adalah 21.506 hektar yang meliputi sungai, cekdam, rawa atau genangan. Sedangkan pada TW I tahun 2024 jumlah nelayan terbina adalah sebanyak 50 orang

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah nelayan terbina}}{\text{Jumlah total nelayan}} \times 100\%$$

Tabel 2.14 Capaian Persentase nelayan perairan umum yang terbina 2019-2024 TW I

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	na	na	12,48	43,58	36,7	4,59

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan TW I Tahun 2024 persentase nelayan umum terbina sejumlah 4,59%.

Adapun data nelayan perairan umum per kecamatan adalah sebagai berikut::

Tabel 2.15 Data Nelayan perairan umum terbina Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Nelayan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Parakan	62	na	na	16	30	10	
2	Kledung	1	na	na				20
3	Bansari	0	na	na		20	105	
4	Bulu	45	na	na				

5	Temanggung	125	na	na	15	50	20	30
6	Tlogomulyo	1	na	na		10		
7	Tembarak	120	na	na		5		
8	Selopampang	65	na	na	5			
9	Kranggan	112	na	na	5	35		
10	Pringsurat	75	na	na	10	10		
11	Kaloran	110	na	na		25		
12	Kandangan	56	na	na		20		
13	Kedu	124	na	na	5		110	
14	Ngadirejo	5	na	na	5	20		
15	Jumo	63	na	na	10	15	70	
16	Gemawang	11	na	na		45	75	
17	Candiroto	60	na	na	5	100	10	
18	Bejen	51	na	na				
19	Tretep	0	na	na				
20	Wonobojo	4	na	na	4	50		
JUMLAH		1.090				80	400	50

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Data di atas merupakan data nelayan perairan umum di Kabupaten Temanggung. Pembinaan nelayan dilaksanakan bersamaan dengan waktu penebaran benih ikan di perairan umum

4. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih Ikan

Penebaran benih ikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Bidang Perikanan. Lokasi penebaran benih ikan (restocking) merupakan perairan umum yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Secara definisi perairan umum daratan yaitu bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tertutup massa air, terbentuk secara alami atau buatan dan terletak mulai garis pasang surut laut terendah ke arah daratan, bersifat umum (bukan milik perorangan). Di kabupaten Temanggung perairan umum berupa sungai, embung, cekdam, dan genangan air lainnya.

Jenis ikan yang ditebar meliputi ikan nila, ikan nilem, dan ikan uceng dan udang galah. Ikan berasal dari hasil pengadaan maupun hasil produksi sendiri dari Balai Benih Ikan Mungseng.

Tingginya animo masyarakat dibuktikan dengan banyaknya permintaan akan penebaran benih ikan di

perairan umum yang diajukan oleh Kepala Desa. Dari tabel dibawah dapat dilihat peningkatan baik dari segi jumlah benih maupun jumlah lokasi penebaran benih ikan. Hal ini juga membuktikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Rumus Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan yaitu :

$$\frac{\text{jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n - \text{jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n-1}{\text{jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n-1} \times 100\%$$

jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun n-1

Tabel 2.16 Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan TW I Tahun 2024

No.	Jenis data	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Lokasi Tebar	na	na	20	29	9	6
2.	Persentase Peningkatan lokasi penebaran benih ikan	na	na	222%	100%	45%	20,68%

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Target peningkatan lokasi penebaran benih ikan adalah 10% untuk tahun 2024, sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan Tahun 2024 telah tercapai (35 lokasi).

Tabel 2.17 Data Jumlah Benih (Ekor) Yang Ditebar Di Perairan Umum Tahun 2019 – 2024

No	Jenis Ikan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan Nila (ekor)	na	10.750	13.600	1.000	3.000	
2	Ikan Nilem (ekor)	na	23.000	79.326	110.400	7.650	1.000
3	Ikan Uceng (ekor)	na	900	1.000	4.700	250	
4	Udang	na			50.000	200.000	

	Galah (ekor)						
	Jumlah		34.650	93.926	166.100	210.900	1.000

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Tabel 2.18 Rekap penebaran dan nelayan yang terbina TW I Tahun 2024

NO.	TANGGAL	LOKASI	PEMBINAAN NELAYAN
1	27 Jan 2024	Kel Butuh, Kali Cangkring	10
2		Kel Butuh, Kali Jambe	10
3		Kel Butuh, Kali Jetis	10
4	24 Feb 2024	Desa Jeketro Kec. Kledung, Kali Sigambir	10
5		Desa Jeketro Kec. Kledung, Kali Seketekan	10
		Desa Jeketro Kec. Kledung, Kali Legok	
	Jumlah		50

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

5. Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan atau disingkat dengan AKI merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang/ masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar dengan satuan kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan yang didapatkan dari konsumsi ikan dalam rumah tangga + konsumsi ikan luar rumah tangga + konsumsi ikan tidak tercatat. AKI merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang secara teknis dilaksanakan pada Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Manfaat dari perhitungan AKI adalah untuk:

- a. Menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah
- b. Mengetahui pola konsumsi Masyarakat dan analisis

preferensi konsumen di suatu daerah

- c. Mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani.

Rumus AKI = Jumlah konsumsi di Rumah Tangga + Jumlah Konsumsi diluar rumah tangga+ Konsumsi tidak tercatat

Tabel 2.19 Capaian angka Konsumsi Ikan TW I Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kap	na	na	na	na	na	21,78

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa sampai dengan TW I capaian angka konsumsi ikan sebesar 21,78 kg/kap. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan Angka Konsumsi Ikan adalah Data Susenas BPS, Survey Bahan Pokok BPS, Data BPS terkait jumlah penduduk, tingkat pengangguran, pangsa pengeluaran pangan dan makanan jadi, jumlah hotel, jumlah tamu hotel, dan volume impor produk perikanan.

Konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya ekonomi tapi juga budaya, ketersediaan, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya. Dengan memperhatikan beragam faktor tersebut dapat memperjelas alasan tingkat konsumsi pangan termasuk konsumsi ikan di suatu daerah dapat berbeda secara signifikan. Perhitungan AKI dengan menggunakan data Susenas adalah tepat karena diperoleh angka konsumsi ikan secara nyata, namun data Susenas masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga untuk mendapatkan angka yang akurat mendekati kebenaran, masih diperlukan angka koreksi. Angka koreksi yang digunakan adalah angka koreksi untuk konsumsi di luar rumah tangga (B) dan konsumsi tidak tercatat (C). Pada saat ini penetapan besarnya angka koreksi dilakukan dengan

expert adjustment (pendapat pakar) yang berkompeten.

C. BIDANG PERTANIAN

INDIKATOR SASARAN

1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator makro ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian menurut lapangan usaha selama satu periode tertentu (tahunan/triwulan). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB disajikan dalam dua pendekatan yaitu PDB atas harga berlaku dan PDB atas harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ini dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi atau menggambarkan tingkat (level) nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh faktor produksi dalam perekonomian. PDB atas harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (tahun 2010). PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau tingkat pertumbuhan riil (nyata) perekonomian baik secara total maupun menurut lapangan usaha. Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, serta Jasa Pertanian dan Perburuan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 6.174,02 miliar rupiah atau sebesar 22,94 persen. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 93,74 persen. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan yang mencapai 25,92 persen (angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 27,21 persen). Selanjutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,94 persen (turun jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 23.36 persen), disusul oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,95 persen (naik jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 20,62 persen). Berikutnya kategori Kontruksi sebesar 5,63 persen (naik jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,12 persen).

Tabel 2.20 Capaian Kontribusi Sektor Pertenain thd PDRB TW I Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB	%	na	na	na	na	na	22,94

2. Produktivitas Tanaman Pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Tanaman pangan yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah Padi, Jagung dan Ubi kayu.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu

tahun (kwintal) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman pangan diperoleh dari produktivitas tanaman pangan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tanaman padi, jagung dan ubi kayu.

$$\text{Rumus perhitungan} = \text{Total Produksi} / \text{Luas Panen}$$

Produktivitas tanaman pangan di kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.21 Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan 2019-2024 TW I

No.	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas Padi							
	Luas Panen	ha	30.567,1	26.458,5	20.553,80	16.784,3	18.038,8	7.55,140
	Produksi	ton	196.847	156.105,7	121.262,700	105.992,7	114.471,7	465.08,8
	Produktivitas	ton/ha	6,4	5,9	5,9	6,315	6,346	6,16
2.	Produktivitas Jagung							
	Luas Panen	ha	14369,1	11.221,5	8.580,3	5.714,7	8.395,50	3.22,7
	Produksi	ton	72.916	54.985,35	38.611,35	26.344,6	38.619,5	183.53,6
	Produktivitas	ton/ha	5,08	4,9	4,500	4,61	4,6	5,69

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai dengan TW I Tahun 2024 untuk produktivitas padi sebesar 6,16 ton/ha dan jagung sebesar 5,69 ton/ha. Capaian kinerja TW 1 disukung oleh kenaikan luas panen dan produksi disebabkan karena adanya penambahan luas tanam di bulan Nopember dan Desember 2023 (yang panen di bulan Januari-Februari 2024, belum terdampak el nino), perbaikan jaringan irigasi yang rusak, penggunaan benih yang berkualitas (unggul dan bersertifikat).

Berbagai upaya dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2024 melalui berbagai bentuk kegiatan fasilitasi, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan

penggunaan benih unggul serta gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Sehingga dengan kondisi serta berbagai hambatan yang akan terjadi di tahun 2023, produktivitas komoditas tanaman pangan di Kabupaten Temanggung masih dapat dipertahankan

3. Produktivitas Tanaman Hortikultura

Istilah hortikultura sendiri asalnya dari bahasa latin yaitu dari kata *Hortus* artinya kebun, dan kata *Culture* artinya bercocok tanam. Jadi secara umum hortikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuan, buah-buahan, ataupun tanaman hias dimana lahan (kebun atau pekarangan rumah) sebagai tempatnya.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran : bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe besar.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman hortikultura di kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.22 Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Putih						
	Luas panen (ha)	3.044	2.481	1.591	1.169,5	1469,5	667
	Jumlah produksi(ton)	24.086,8	16.335,00	10.355,3	8.088,4	10493,3	4335,5
	Produktivitas (ton/ha)	7,91	6,58	6.51	6,916	7,141	6,5
2	Bawang Merah						

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Luas panen (ha)	1.590	1.246	1.555	2.304	2335,5	1479
	Jumlah produksi (ton)	12.798	9.171,10	11.102,1	18.662,4	17901,8	11240,4
	Produktivitas (ton/ha)	8	7,36	7.140	8,1	7,665	7,6
3	Cabai Rawit						
	Luas panen (ha)	2.506	2622	2.977,50	5.045,5	6900	1694
	Jumlah Produksi (ton)	16.706	18.345,7	20.802,9	38.525,415	52095,0	12705,0
	Produktivitas (ton/ha)	6,66	7,00	6,987	7,636	7,55	7,5
4	Cabai Besar						
	Luas panen (ha)	3.175	2859	2.818,00	3.203,5	4175	928
	Jumlah Produksi (ton)	23.022	20.613,8	19.886,6	25.320,724	32368,775	7052,8
	Produktivitas (ton/ha)	7,25	7,21	7.057	7,904	7,753	7,6

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di TW I 2024 produktivitas bawang putih 6,5 kw/ha, bawang merah 7,6 kw/ha, cabai rawit 7,5 kw/ha dan cabai besar 7,6 kw/ha. Capaian ini disebabkan meningkatnya animo masyarakat masyarakat mulai beralih ke tanaman hortikultura karena trend harga jual tinggi (dengan range waktu yang lama).

Factor penghambat peningkatan produktivitas tanaman hortikultura seperti perubahan regulasi pupuk subsidi, kenaikan harga pupuk non subsidi, faktor perubahan cuaca/iklim (El nino), perubahan cuaca/iklim berpengaruh pada kenaikan serangan penyakit pada tanaman hortikultura. Untuk mengatasi hal tersebut dan mempertahankan produktifitas dilakukan beberapa langkah yaitu pendampingan dan fasilitasi, bantuan sarana dan prasarana pertanian, penggunaan benih unggul, penanganan hama dan penyakit secara lebih dini, secara berkelompok dan penyuluhan GAP (Good Agricultural Practices) yang benar, pelatihan pembuatan pupuk organik gunaantisipasi kelangkaan pupuk di pasaran, bimtek pengolahan pasca panen komoditas hortikultura dan

fasilitasi sarana prasarana pasca panen hortikultura. Pada tahun 2023 ini harga bawang merah, dan cabai petani mendapat harga yang baik sehingga minat untuk menanam komoditas hortikultura semakin meningkat di tahun 2024.

4. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Definisi perkebunan menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan adalah pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim/tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Tanaman perkebunan dapat dikelompokkan menjadi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh selama satu musim pada tahun tersebut atau bisa dikatakan tumbuhan tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Tanaman tahunan adalah suatu tumbuhan yang dapat tumbuh lebih dari dua tahun bahkan lebih dari puluhan tahun. Tanaman tahunan biasanya merujuk pada tumbuhan berkayu keras.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman perkebunan utama di Kabupaten Temanggung yaitu : tembakau, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, dan Vanili.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Temanggung sampai dengan TW I masih menggunakan data TW IV Tahun 2023 karena statistik perkebunan dilakukan tiap semester. Berikut data produktivitas tanaman perkebunan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.23 Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 TW I

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Tembakau						

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas panen (ha)	18.868,98	11.598,0	18.293,08	15.801	14.764	14.764
Jumlah produksi (ton)	12.820	17.102	12.585,639	10.562,6	9.685,73	9.685,73
Produktivitas (ton/ha)	0,68	0,678	0,688	0,668	0,656	0,656
2 Kopi Robusta						
Luas panen (ha)	11.105,82	11.507	11.724,46	12.977,37	12.972,2	12.972,2
Jumlah produksi (ton)	7.574,15	7.813,1	83.841,6	8.994,321	8.476,9	8.476,9
Produktivitas (ton/ha)	0,68	0,679	0,715	0,693	0,653	0,653
3 Kopi Arabika						
Luas panen (ha)	1.095,13	1369	1.564,36	1.699,95	1.724,95	1.724,95
Jumlah Produksi (ton)	675,6	848,8	955,24	1.002,97	9.924,34	9.924,34
Produktivitas (ton/ha)	0,617	0,62	0,611	0,65	0,575	0,575

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja beberapa komoditas perkebunan belum memenuhi target (status upaya keras) dengan penjelasan sebagai berikut luas panen dan produksi komoditas tembakau mengalami penurunan dari tahun 2021, hal ini disebabkan karena perubahan cuaca/iklim ekstrem (mundur 2 dasarian yang berpengaruh pada jadwal tanam, tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanam, saat panen maupun pasca panen, pada masa pertumbuhan tanaman terdapat el Nino sehingga pertumbuhan tanaman terganggu/tidak maksimal), kestabilan harga yang tidak menentu (cenderung turun setiap tahun) sehingga petani beralih ke komoditas yang lain yang lebih menguntungkan.

Tahun 2023 Komoditas kopi mengalami penurunan karena dampak perubahan iklim (saat proses pembungaan intensitas hujan tinggi sehingga bunga rontok) dan dampak elnino (kering) saat proses pertumbuhan buah tidak optimal sehingga produksi dan provitas menurun, dampak perubahan regulasi pupuk sehingga pemupukan kurang intensif (pupuk subsidi terbatas,

pupuk non subsidi harga tinggi), dari dampak dari menurunnya produksi harga kopi mengalami kenaikan yang signifikan sehingga petani tetap diuntungkan.

Khusus untuk kopi arabika, pola tanam sebagian besar secara tumpang sari dengan komoditas lain sehingga pola perawatan, pemupukan dan pemeliharaan belum optimal. Dampak perubahan iklim dan elnino berpengaruh pada penurunan produksi dan provitas. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produktifitas tanaman perkebunan diantaranya melalui pelatihan GAP dan fasilitasi serta pendampingan oleh PPL secara intensif, pemberian bantuan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen, pengembangan kopi dan vanili dengan benih unggul yang berkualitas, peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat, pelatihan budidaya dan PPHT.

C. BIDANG PERTANIAN (SUB BIDANG PETERNAKAN)

1. Produktivitas Ternak Ruminansia

Definisi Produktivitas Ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto, 1994.

Ternak ruminansia adalah mamalia berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, dan kijang yang merupakan Subordo **Ruminantia**. Nama ruminansia berasal dari bahasa Latin “ruminare” yang artinya mengunyah kembali atau memamah biak, sehingga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hewan memamah biak.

Ternak ruminansia dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok ternak ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau dan kelompok ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba (Blakely dan Bade, 1998)

Yang dimaksud ternak ruminansia pada indikator ini

hanya tiga jenis ternak meliputi: sapi, kambing, dan domba. Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Selain itu terdapat hasil sampingnya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh “berat/bobot hidupnya”. Secara umum, semakin banyak bobot hidupnya maka akan semakin besar tingkat produksi dagingnya.

Rumus produktifitas ternak ruminansia diperoleh dari Jumlah Produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong ditambah konstanta (C = rata rata selisih karkas yang dipotong di rumah pemotongan hewan dengan pemotongan pada saat hari raya idul adha).

Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.24

Produktivitas Ternak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

No	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi						
	- Jumlah Produksi daging (Kg)	671.09 9	637.46 8	775.372	737.178	876.265	133003
	- jumlah ternak yang dipotong (ekor)	3.971	3.772	4.588	4.362	5.185	787
	- Konstanta	7,8	8	8,2	8,4	8,60	8,60
	- Produktivitas (Kg/ekor)	176,80	177	177,20	177,4	177,6	177,6
2	Kambing						
	- Jumlah Produksi daging	8.681	8.100	7.898	11.259	9.963	1.215,00
	- jumlah ternak yang dipotong	643	600	585	834	738	90
	- Konstanta	0,16	0,8	0,19	0,20	0,21	0,21
	- Produktivitas	13,67	13,68	13,69	13,7	13,71	13,71
3	Domba						
	- Jumlah Produksi daging	179.48 3	231.32 3	227.273	249.007, 5	241.785	4.293,00
	- jumlah ternak yang dipotong	13.295	17.135	16.835	18.445	17.910	318

Konstanta	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21
Produktivitas	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71	13,71

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Produktivitas ternak potong di Kabupaten Temanggung tahun 2019-2024 mengalami kenaikan khususnya produktivitas ternak sapi, untuk produktivitas ternak sapi pada tahun tahun 2022 sebesar 177,4 kg/ekor dan tahun 2024 menjadi 177,6 kg/ekor, sedangkan untuk produktivitas ternak kambing dan ternak domba pada tahun Tahun 2024 sebesar 13,71. Produktivitas sapi, produktivitas kambing dan domba tercapai 100% sesuai target.

2. Produktivitas Ternak Unggas

Definisi Produktivitas Ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto, 1994. Jenis ternak meliputi: Ternak Ayam Ras Pedaging, Ternak Ayam Ras Petelur dan Ayam Buras.

Produktivitas ternak ayam ras pedaging dan ayam buras diukur dari jumlah produksi dagingnya sedangkan produktivitas ayam ras petelur diukur dari jumlah produksi telurnya. Secara umum semakin besar bobot badan/bobot hidup ternak unggas yang dipotong semakin besar juga angka produktivitasnya. Sedangkan untuk ayam ras petelur, produktivitas selain dipengaruhi gen juga dipengaruhi lingkungan (faktor pakan, lingkungan dan pemeliharaan).

Rumus penghitungan produktivitas ayam ras pedaging dan ayam buras diperoleh dari jumlah produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong. Sedangkan rumus penghitungan produktivitas ayam ras petelur diperoleh dari jumlah produksi telur dibagi jumlah populasi ternak.

Perkembangan produktivitas ternak unggas selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25 Produktivitas Ternak Unggas Tahun 2019-2024 TW I

No.	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam Ras Pedaging						
	- Jumlah Produksi daging (Kg)	10.211.850	6.914.355	7.047.798	6.128,440,13	6.147.188	1543594
	- jumlah ternak yang dipotong (ekor)	13.615.000	9.219.140	9.397.064	8.171.253,5	8.196.251	2058125
	- Produktivitas (Kg/ekor)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
2	Ayam Ras Petelur						
	- Jumlah Produksi telur	8.434.221	7.886.499	7.259.257,8	7.350.731	7.839.791,51	2053792,97
	- jumlah populasi ternak	782.061	705.714	707.530	710.530	720.530	755.030
	- Produktivitas (kg/ekor)	10,88	10,88	10,26	10,35	10,88	2,72

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

3. Persentase kelahiran Pedet

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut 'insemination gun'. Persentase kelahiran Pedet merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan inseminasi buatan.

Tujuan Inseminasi Buatan

- Memperbaiki mutu genetika ternak;
- Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya;
- Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara

lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama;

- Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur;
- Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin.

Keuntungan Inseminasi Buatan (IB)

- Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan;
- Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik;
- Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding);
- Dengan peralatan dan teknologi yang baik sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama;
- Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati;
- Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar;
- Menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.

Kerugian Inseminasi Buatan (IB)

- Apabila identifikasi birahi (estrus) dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat maka tidak akan terjadi terjadi kebuntingan;
- Akan terjadi kesulitan kelahiran (distokia), apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed / turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan / breed kecil;
- Bisa terjadi kawin sedarah (inbreeding) apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama;
- Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik (tidak melalui suatu progeny test).

Rumus Persentase kelahiran pedet dihitung dari jumlah

akseptor IB dibagi jumlah kelahiran pedet dikalikan 100%

$$\frac{\text{Jumlah akseptor IB} \times 100\%}{\text{Jumlah kelahiran pedet}}$$

Tabel 2.26 Presentase Kelahiran Pedet Tahun 2019-2024 TW I

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kelahiran pedet	na	na	na	na	na	166,2

Dari tabel diatas diperoleh dari perhitungan jumlah akseptor IB sebanyak 733 ekor dibagi pedet yang lahir sejumlah 441 ekor. Pedet yang lahir ini adalah hasil dari IB pada tahun 2023 yang lahir pada Tahun 2024 (masa bunting sapi 9 bulan 10 hari). Faktor pendorong, Kab temanggung sebagai wilayah yang potensial utk pengembangan ternak sapi mengingat faktor geografis yang mendukung terutama ketersediaan pakannya. Faktor penghambat yaitu munculnya wabah penyakit PMK dan LSD 2 tahun terakhir mengakibatkan turunnya populasi sapi termasuk betina produktif sehingga jumlah akseptor menurun. Hal ini berkorelasi positif terhadap menurunnya kelahiran pedet 2 tahun terakhir. Selain itu akseptor yang sudah di IB tidak dilaporkan kelahirannya dikarenakan sudah dijual dalam keadaan bunting, selain itu peternak tdk mengabari petugas inseminator jika pedetnya sudah lahir. Upaya pencapaian target dengan peningkatan dan optimalisasi reproduksi sapi betina produktif, pencegahan dan pengobatan gangrep (gangguan reproduksi)

4. Persentase Penanganan Penyakit Hewan

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan dan penanggulangan penyakit

hewan, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

Penyakit hewan merupakan semua penyakit yang dapat menjangkiti hewan. Penyakit hewan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

Persentase penanganan penyakit hewan menular adalah persentase jumlah penanganan penyakit oleh pusat kesehatan hewan (puskesmas) dan petugas kesehatan hewan dibagi jumlah pelaporan kasus penyakit hewan dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100 \%$$

Pada TW I tahun 2024 penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: cacangan, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), diare, Rhinitis, Scabies, Jamur, Pneumonia, Keracunan, dll. Pada TW I ini Kabupaten Temanggung sudah mulai terjangkit Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD). Sampai dengan TW I 2024 total terdapat 333 laporan kasus dan yang tertangani 319 kasus. Sehingga presentasi yang telah tertangani sebanyak 95,79%.

Tabel 2.27

Capaian Persentase Penanganan penyakit Hewan TW I
Tahun 2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penanganan penyakit Hewan	na	na	96,68	100	97,26	95,8

Tabel 2.28

Laporan Jumlah Kasus

**REKAPITULASI PENYAKIT DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
2024**

NO.	JENIS PENYAKIT	JENIS HEWAN					JUMLAH TOTAL
		KUCING	ANJING	DOMBA/ KAMBING	SAPI	LAINNYA	
1	Abortus				1		1
2	Abses	5		1	1		7
3	Avitaminosis	10		2	7	2	21
4	Avitaminosis post partus				1		1
5	BEF			1	2		3
6	Bloat				7		7
7	Cek Kesehatan	5	4		3		12
8	Debris	6			5		11
9	Demam	1					1
10	Dermatophytosis	2	2				4
11	Distokia				2		2
12	Enteritis	26		1	3		30
13	Fraktur				4		4
14	FLUTD	11	1				12
15	Gastritis	3					3
16	Grass tetany			2			2
17	Gejala Panleukopenia	3					3
18	Glukoma	1					1
19	Helminthiasis	2		3	56		61
20	Hipofungsi ovary				2		2
21	Hipocalcemia			1	5		6
22	HPO				1		1
23	Infestasi Kutu	4					4
24	Infeksi Peritonitis	1					1
25	Konjungtivitis	5					5
26	Konstipasi	1					1
27	LSD				11		11
28	Mastitis			1	2		3
29	Normal tidak bunting				1		1
30	Radang Kandung kemih	4					4
31	Otitis Externa	1					1
32	PMK				5		5
33	Pneumonia				1		1
34	Prolaps Uteri				1		1
35	Rhinitis	25		2	8	1	36
36	Scabies	46		1	5		52
37	Sindrom Sapi Ambruk (SSA)				2		2
38	Suspek calici	1					1
39	Vulnus	3					3

JUMLAH	162	7	15	133	3	
JUMLAH TOTAL	333					
JUMLAH TERTANGANI	319					
PRESENTASE TERTANGANI	95,80					

4. Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat.

Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat merupakan salah satu indikator pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Kesmavet merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia serta kesehatan lingkungan.

Kesmavet sebagai salah satu unsur dari urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia melalui hewan dan/atau produk hewan adalah penyakit hewan yang masuk dalam kategori zoonosis.

Produk hewan adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan seperti daging, lemak, darah, susu, telur, enzim, dan sebagainya.

Bahan asal hewan (disingkat BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, termasuk diantaranya daging, susu, telur, bulu, tanduk, kulit, tulang, dan mani.

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan bertujuan untuk menjamin kesehatan produk hewan dan bahan asal hewan sehingga terbebas dari penyakit yang dapat ditularkan melalui produk hewan/*food borne disease*.

Rumus persentase pengawasan produk hewan (bahan asal hewan) adalah jumlah produk hewan (bahan asal hewan) yang memenuhi syarat dibagi total jumlah produk hewan (bahan asal hewan) yang diawasi dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hewan (Bahan Asal Hewan) yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Produk Hewan (Bahan Asal Hewan) yang diawasi}} \times 100 \%$$

Table 2.27

Capaian Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Tahun 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	60	84,298	82,96	100	82,1	85,23

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pengawasan produk hewan tahun 2024 sebesar sebesar 85,23 (target 75% tercapai). Penjaminan produk hewan dapat dilakukan melalui pengaturan peredaran produk hewan dengan kegiatan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi, untuk menjamin keamanan produk hewan sejak dalam proses budidaya hingga peredaran (*safe from farm to table*).

Penjaminan higiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar sistem jaminan keamanan pangan. Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan (*food borne disease*) atau menggunakan produk hewan dengan mengendalikan resiko produk hewan dalam proses produksi tercemar atau terkontaminasi oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta resiko produk hewan yang tidak halal bagi yang dipersyaratkan.

Pengambilan sampel dilakukan secara uji petik mengingat keterbatasan dana yang ada. Ke depan perlu perencanaan dan pendanaan yang memadai jika ingin mewujudkan peta penyakit hewan yang ideal dengan sampling di 20 kecamatan secara merata. Pada tahun 2024 dilakukan pengambilan sampel feses untuk

melihat kasus cacingan, pengambilan sampel serum dan darah ternak untuk mengetahui penyakit pada ternak, serta pengambilan berbagai jenis sampel produk hewan/ bahan asal hewan untuk mengetahui keASUHAN (Aman, sehat, Utuh dan Halal) dari bahan pangan asal hewan. Hasil uji yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sampel Produk Hewan

a. Sampel organ hati

Hasil pemeriksaan sampel organ hati sapi terhadap keberadaan cacing hati di Rumah Potong Hewan (RPH) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29 Sampel Organ Hati

No.	Lokasi	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil Pemeriksaan	
				Cacing Hati	Penyakit Lainnya
1	RPH Temanggung	Hati	409	55	7
2	RPH Parakan	Hati	31	3	0
	JUMLAH		440	58	7

Sumber: Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

Hasil pemeriksaan postmortem/setelah dipotong yang dilakukan di RPH Parakan dan Temanggung pada Triwulan I tahun 2024 terhadap sampel organ hatinya adalah dari total pemotongan sebanyak 440 ekor, hasil pemeriksaan hatinya ditemukan sebanyak 58 buah ditemukan cacing hati. Persentase kasus cacing hati dari sapi yang dipotong di RPH adalah 13,18%. Sedangkan presentase kasus penyakit lainnya sebanyak 1,59 %. Presentase produk hewan yang memenuhi syarat sebanyak 85,22 %. Hati yang mengandung cacing hati diafkir dan tidak boleh dikonsumsi karena bisa membahayakan kesehatan.

5. Persentase Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan sesuai fungsinya

Prasarana pertanian adalah infrastruktur pendukung yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan pertanian. Salah satunya dengan fasilitasi pengembangan sumber-sumber air dengan pembangunan jaringan irigasi usaha tani yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah prasarana yang dimanfaatkan} \times 100\%}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}}$$

Tabel 2.30 Capaian Kinerja TW I Tahun 2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	na	na	na	na	na	

Prasarana pertanian (sumber-sumber air) yang selama ini dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal dan berfungsi dengan baik. Di tahun 2023 sebanyak 59 unit telah dibangun dan dimanfaatkan oleh Masyarakat. Sampai dengan TW I Tahun 2024, belum ada Pembangunan baru karena masih dalam tahap verifikasi dan validasi lokasi dan proses penyusunan dokumen pengadaan.

6. Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian

Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan input produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat

juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

Indikator persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian dihitung dari jumlah luasan tertangani dibagi jumlah luasan terpapar yang terjadi / dilaporkan di Kabupaten Temanggung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah luasan tertangani (ha)}}{\text{Jumlah luasan yang terpapar (ha)}} \times 100\%$$

Tabel 2.31 Capaian Kinerja TW I Tahun 2023

No		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	na	na	41,2 (100%)	41,45 (100%)	40,62 (100%)	109,29 (100%)

Tabel diatas diperoleh dari perhitungan sampai TW I tahun 2024 luas cakupan pengendalian 204,7 ha dari total luas hamparan lokasi yang terpapar seluas 187,302 hektar (berdasarkan laporan yang masuk). Luas pengendalian lebih banyak dari yang terpapar dikarenakan sebagai upaya antisipasi/mitigasi terhadap perluasan serangan hama yang sangat cepat. Gerakan pengendalian dilakukan secara swadaya, kerjasama dengan kelompok dan kerjasama dengan laboratorium hama provinsi. Upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir serangan hama/penyakit yaitu pelatihan PPHT (penerapan pengendalian hama terpadu), pelatihan pembuatan pestisida nabati, penyediaan obat-obatan. Faktor yang mempengaruhi gerakan pengendalian jumlah obat-obatan yang terbatas dan luas daerah yang terpapar sangat luas, jenis serangan hama penyakit yang semakin beragam.

7 Persentase kelompok tani yang naik kelas

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani

belum sepenuhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usahatani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini adalah pembagian kelas kemampuan kelompok tani (pemula, lanjut, madya, utama) yang berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehingga penyuluhan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan usahatani yang efektif dan efisien. Data capaian kinerja TW I Tahun 2024 masih menggunakan data capaian kinerja TW IV Tahun 2023 (40 kelompok tani yang naik kelas), karena penilaian kenaikan kelas kelompok belum dilaksanakan.

Persentase kelompok tani yang naik kelas dimaksudkan berapa persen kelompok tani yang naik kelas dari pemula ke Lanjut, kelas Lanjut naik ke Madya dan dari kelas Madya naik Utama dibagi jumlah total kelompok kali seratus persen.

$$\text{Persentase kelompok tani yang naik kelas} = \frac{\text{jumlah kelompok tani yang naik kelas}}{\text{jumlah total kelompok tani}} \times 100 \%$$

Table 2.32

Jumlah Kelompok tani yang naik kelas TW I Tahun 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 TW I
1.	jumlah kelompok tani yang naik kelas	12	15	22	28	40	40

Tahun 2023 sebanyak 40 kelompok (1,48%) dari total kelompok tani yang terdaftar 2.709, target Tahun 2023 tercapai 100%. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas kelompok tani diantaranya adalah :

- 2.1.2. Terselenggaranya pembinaan dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas petani.
- b. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok tani/Gapoktan.
- c. Pemahaman petani dalam menggali kelompoknya.
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui sekolah lapang

DATA KENAIKAN KELAS KELOMPOK TANI KABUPATEN TEMANGGUNG 2023

NO	Nama Kelompok	Alamat	Kenaikan Kelas	Nama Ketua
1	KT Argo Makmur	Desa Jlegong Kec.Bejen	Pemula ke Lanjut	Sapayat
2	KT Argo Martani II	Desa Lowungu Kec.Bejen	Pemula ke Lanjut	Sukrisno
3	KT Ambengsari	Desa Gedongsari,Jumo	Pemula ke Lanjut	Sumardi
4	KT Ngasinan	Desa Karangtejo, Jumo	Pemula ke Lanjut	Budi Winata
5	KT Tani Harapan	Desa Jambon Kec.Gemawang	Pemula ke Lanjut	Riwanto
6	KT Sumber Subur	Desa Gemawang Kec.Gemawang	Pemula ke Lanjut	Zaenal
7	KT Berkah Karya	Desa Gentingsari Kec.Bansari	Pemula ke Lanjut	M Yuliyadi
8	KT Bangun Jaya Tani	Desa Gunungsari Kec.Bansari	Pemula ke Lanjut	Tuyono
9	KT Maju Dadi	Desa Kemloko Kec.Tembarak	Pemula ke Lanjut	Miftah
10	KT Gatot Koco	Desa Jragan Kec. Tembarak	Pemula ke Lanjut	Rofiq
11	KT Pangudi Sari	Desa Candimulyo Kec. Kedu	Pemula ke Lanjut	Supriyono
12	KT Sidorejo	Desa Kundisari Kec. Kedu	Pemula ke Lanjut	Bejo Saryanto
13	KT Tani Unggul	Desa Cemoro Kec.Wonoboyo	Pemula ke Lanjut	Suswanto
14	KT Mekarsari	Desa Kebonsari Kec.Wonoboyo	Pemula ke Lanjut	Imbang Prihantoro
15	KT Remaja 04	Desa Kedungumpul Kec.Kandangan	Pemula ke Lanjut	Setyawan Yuwono
16	KT Mulyo Satu	Desa Kandangan Kec.Kandangan	Pemula ke Lanjut	HB Mujiono
17	KWT Surya Mandiri	Desa Gilingsari Kec.Temanggung	Pemula	Suyoto
18	KT Ngudi Rejeki	Kel Tlogorejo Kec.Temanggung	Pemula	Sulaminto

19	KTJoyo Rejo	Desa Katekan Kec.Ngadirejo	Lanjut ke Madya	Hasam As'ari
20	KT Purnomosari I	Desa Purbosari Kec.Ngadirejo	Pemula ke Lanjut	Sudari
21	KT Tani Rahayu Satu	Desa Sigedong Kec.Tretep	Pemula ke Lanjut	Royikin
22	KT Suka Makmur	Desa Bendungan Kec.Tretep	Pemula ke Lanjut	Anang Asroni
23	KWT Lestari	Desa Watukumpul Kec. Parakan	Pemula ke Lanjut	Sri Wahyuningsih
24	KT Mitra Mandiri	Desa Mandisari Kec. Parakan	Lanjut ke Madya	Asrofi
25	KT Sumber Mulyo	Desa Petarangan Kec.Kledung	Pemula ke Lanjut	Mediono
26	KT Maju Bersama	Desa Jeketro Kec.Kledung	Pemula ke Lanjut	Agus Panjang
27	KT Tanggul Makmur	Desa Tanggulanom Kec.Selopampang	Pemula ke Lanjut	Murih
28	KT Suka Maju	Desa Jetis Kec. Selopampang	Pemula ke Lanjut	Kamat
29	KT Damarwulan	Desa Sriwungu Kec.Tlogomulyo	Pemula ke Lanjut	Sudarmanto
30	KT Mitra Lestari	Desa Gedegan Kec.Tlogomulyo	Pemula ke Lanjut	Riswanto
31	KT Karya Dadi	Desa Sanggrahan Kec.Kranggan	Pemula ke Lanjut	Ramelan
32	KT Sidodadi	Desa Ngropoh Kec.Kranggan	Pemula ke Lanjut	Slamet Riyadin
33	KT Sumbing Makmur	Desa Gondosuli Kec.Bulu	Pemula ke Lanjut	Muhlisun
34	KT Trampil I	Desa Tegallurung Kec.Bulu	Pemula ke Lanjut	Saefudin
35	KT Sumber Rejeki	Desa Gowak, Kec.Pringsurat	Lanjut ke Madya	Suranto
36	KT Sari Makmur	Desa Rejosari Kec.Pringsurat	Pemula ke Lanjut	Sukardi
37	KT Tani Subur	Desa Tleter Kec. Kaloran	Pemula ke Lanjut	Sarjono
38	KT Sido Dadi	Desa Tegowanuh Kec.Kaloran	Pemula ke Lanjut	Domamir
39	KT Sedyo Maju II	Desa Muntung Kec. Candiroto	Pemula ke Lanjut	Mudiyono
40	KT Tani Makmur	Desa Plosogaden Kec. Candiroto	Pemula ke Lanjut	Kiryanti Wisnu Aji

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DKPPP dari 33 indikator semua mencapai target 100 %,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPPP, antara lain :
 - Perubahan regulasi pupuk

- Kurangnya penggunaan bibit unggul dan bersertifikat
- Perubahan iklim yang berpengaruh pada meningkatnya serangan hama dan penyakit
- Perubahan Komoditas yang dibudidayakan
- Validasi data pertanian dan pemetaan daerah surplus defisit
- Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian (penguatan kinerja dan hilirisasi)
- Masih lemahnya korporasi petani
- Ketersediaan prasarana, sarana dan infrastruktur yang terbatas dan belum merata (modernisasi pertanian/smart farming, pertanian presisi)
- Pengawasan produksi di lapangan oleh penyuluh masih belum optimal
- Keberagaman konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada beras saja dan konsumsi protein makin meningkat.

Memperhatikan isu-isu penting tersebut di atas dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, maka dalam jangka pendek kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung difokuskan pada:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian dan perikanan dengan penggunaan benih/bibit unggul/bermutu, pengendalian hama/penyakit, peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian dan perikanan.
2. Pengendalian konversi lahan
3. Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan Pangan, Pemanfaatan Pangan, Penguatan Kelembagaan dan

Infrastruktur Pangan, Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan, Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan, memperlancar distribusi dan pasokan.

4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar profesi dan daerah, keterpaduan yang berkelanjutan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan.
5. Peningkatan pelaksanaan asuransi pertanian, dan pengendalian OPT dan pencegahan serta pengendalian zoonosis
6. Penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kapasitas SDM penyuluhan
7. Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian sumberdaya perikanan kepada masyarakat

2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan pagu sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu sejumlah 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
2. Terdapat pengurangan pagu pada sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - g. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - i. Pemeliharaan Mebel
 - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - l. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - m. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - n. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - o. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
 - p. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - q. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

- r Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- s Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- t Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- u Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- v Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- w Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
- x Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
- y Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- z Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- aa Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
- bb Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- cc Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- dd Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- ee Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- ff Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.43 berikut:

Tabel 2.33

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN RENJA KAB TEMANGGUNG TAHUN 2025			HASIL PENETAPAN		
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	74.086.150.797		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	77.165.785.861
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.063.893.754	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	49.410.893.754
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.978.893.754	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.380.893.754
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.029.388.994,00	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.029.388.994
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.388.994,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.388.994
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.000.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.430.000.000	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.000.000.000
	Pengadaan Mebel	250.000.000			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000.000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30000000			
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.944.504.760	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.911.504.760
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.802.004.760		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.780.004.760

e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.000.000	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000
	Pemeliharaan Mebel	20.000.000			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.000.000	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10.000.000
a	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000	a	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000
b	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	b	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	45.000.000	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000
a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	290.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	245.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	120.000.000	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.000.000
a	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30000000	a	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	30000000		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
b	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	b	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	90.000.000		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.000.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	40.000.000	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	235.000.000
a	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	0	a	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	225.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	0		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	225.000.000
b	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	40.000.000	b	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	10.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10000000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000	6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-

a	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	20.000.000	a	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.000.000		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	110.000.000	7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	9.000.000
a	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10.000.000	a	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
b	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	b	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.000.000
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	100.000.000		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000

	Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	23.732.257.043		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.509.892.107
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.757.201.143	8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.460.436.207
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	13.507.201.143	a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14.807.159.707
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.407.201.143		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.231.159.707
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100.000.000		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.576.000.000
b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.653.276.500
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	150.000.000		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.643.276.500
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	100.000.000		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	10.000.000
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.203.330.900	9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.047.230.900

a	Pengembangan Prasarana Pertanian	175.000.000	a	Pengembangan Prasarana Pertanian	24.500.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	24.500.000
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	175.000.000		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	-
b	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.028.330.900	b	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.022.730.900
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	867.705.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	836.605.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	135.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5.078.915.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.999.415.000
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.081.710.900		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.051.710.900
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	771.725.000	10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	651.725.000

a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
b	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	671.725.000	b	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	591.725.000
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	671.725.000		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	591.725.000
11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	550.000.000	11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	500.000
a	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	550.000.000	a	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	500.000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500.000.000		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500.000
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-
12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	450.000.000	12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	350.000.000

a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	450.000.000	a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	350.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10.000.000
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	0

Sumber : DKPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat ditampung melalui mekanisme musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui proses musrenbang dan forum OPD diperoleh data usulan masyarakat untuk pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan sebagaimana disebutkan dalam

Tabel 2.34

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikat or Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Pelatihan dan pengembangan anggrek di wilayah kelurahan jampirejo	Kelurahan Jampirejo	1 paket	Rp 150.000.000	Pelatihan dan pengembangan anggrek di wilayah kelurahan jampirejo

2.5 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ada 4 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.35

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Smart Farming	DKPPP, KT< KWT, Gapoktan	Swadaya, APBN	Fasilitasi mekanisasi pertanian modern, dari hulu sampai hilir	Fasilitasi mekanisasi pertanian modern, dari hulu sampai hilir	Meningkatnya produksi komoditas pertanian • Meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian	2021-2023
2	Si- mbakon	DKPPP	-	Aplikasi CPCL	Database bantuan semua sumber anggaran	Meningkatnya manajemen CPCL, mengurangi duplikasi bantuan	2023
3	Bwang Geol Agribun	BRIN, DKPPP	-	Penelitian vareistas bawang local unggul	Varietas Bawang Lokal Unggul	Peningkatan produktivitas bawang local unggul	2023
4	Kemloko 7-8	BRIN, DKPPP	APBD	Penelitian varietas	Varietas tembakau local	Peningkatan produktivitas	DKPPP 2023

				tembakau local unggul	tahan penyakit lintat	tembakau local unggul	
--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

2.6 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ada 10 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.36
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I dalam Lomba Penerapan Hygiene sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan Tingkat Provinsi Jawa TengaholehCV Sumber Gizi Desa Kedu Kecamatan Kedu	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DKPPP
2	Petani cabai terbaik (Siswanto Food Estate Kec. Bansari) dari Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Nasional	DKPPP
3	Kategori Petani (Hendi Nur Seto) dari Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Nasional	DKPPP
4	Perempuan berjasa dan berprestasi bidang pertanian Tingkat Jawa Tengah (Poniyah, KWT Pelangi Rukun santoso desa Kaloran Kec Kaloran)	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DKPPP
5	Zero Konsumsi dan Peredaran Daging Anjing dari Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DKPPP
6	Juara I dan II Tembakau Lembutan di Soropadan Agro Festivasl kategori Tegal	Kepala Balai Pelatihan Pertanian	Regional	DKPPP
7	Juara I, II dan III Tembakau Lembutan di Soropadan Agro Festivasl kategori Tegal	Kepala Balai Pelatihan Pertanian	Regional	DKPPP
8	Juara 2 Tingkat Nasional Kelas Pejantan pada Kontes Kambing PE Piala Presiden, atas nama Kelompok Cabe Farm Desa Tretep Kecamatan Tretep	Kementerian Pertanian	Nasional	DKPPP
9	Juara 3 Tingkat Nasional Kelas Anakan Indukan pada Kontes Kambing PE Piala Presiden, atas nama kelompok Jalu farm Desa kertosari Kec Jumo	Kementerian Pertanian	Nasional	DKPPP
10	Juara I Kelompok Tani ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah, atas nama KTT Taruna Tani Karya Mudha	Gubernur	Provinsi	DKPPP

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan Nasional dan peningkatan daya saing berkelanjutan. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung pada urusan Pangan, Perikanan dan Pertanian

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tujuan DKPPP yang dirumuskan dalam Renstra DKPPP 2024-2026 adalah “Meningkatnya perekonomian Daerah” dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian;
- b. Meningkatkan Keberagaman Pola Konsumsi Masyarakat
- c. Meningkatkan Produksi Perikanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKPPP, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja DKPPP .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DKPPP Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan

3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DKPPP Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan Per kapita	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,25
						Produktivitas jagung	54,5
						Produktivitas bawang putih	60,5
						Produktivitas bawang merah	68
						Produktivitas cabai rawit	50
						Produktivitas cabai besar	65
						Produktivitas tembakau	6,2
						Produktivitas kopi robusta	7,1
						Produktivitas kopi arabika	6,5
						Produktivitas ternak sapi	177,4
						Produktivitas ternak domba	13,7
						Produktivitas ternak kambing	13,7
						Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75
						Produktivitas ternak ayam petelur	10,88
						Persentase kelahiran pedet	55,5

				Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100
				Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	85
						Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	75
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	41
				Meningkatnya penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,3
		Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100
				Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100
				Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90
		Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	10
				Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,2

				Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Produktivitas ikan lele	12,6
				Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	10
						Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,08

Sumber : Renstra DKPPP Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi DKPPP Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DKPPP Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DKPPP Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA KAB TEMANGGUNG TAHUN 2025			RKPD KAB TEMANGGUNG TAHUN 2025		
NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	74.086.150.797		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	77.165.785.861
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.063.893.754	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	49.410.893.754
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.978.893.754	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.380.893.754
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.029.388.994,00	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.029.388.994
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.388.994,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.388.994
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.000.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.430.000.000	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.000.000.000
	Pengadaan Mebel	250.000.000			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000.000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30000000			
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.944.504.760	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.911.504.760
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.802.004.760		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.780.004.760

e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.000.000	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000
	Pemeliharaan Mebel	20.000.000			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.000.000	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10.000.000
a	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000	a	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000
b	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	b	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	45.000.000	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000
a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	290.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	245.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	120.000.000	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.000.000
a	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30000000	a	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	30000000		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
b	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	b	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	90.000.000		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.000.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	40.000.000	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	235.000.000
a	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	0	a	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	225.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	0		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	225.000.000
b	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	40.000.000	b	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	10.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10000000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000	6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-

a	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	20.000.000	a	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.000.000		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	110.000.000	7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	9.000.000
a	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10.000.000	a	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
b	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	b	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.000.000
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	100.000.000		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000

	Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	23.732.257.043		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.509.892.107
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.757.201.143	8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.460.436.207
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	13.507.201.143	a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14.807.159.707
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.407.201.143		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	13.231.159.707
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100.000.000		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.576.000.000
b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.653.276.500
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	150.000.000		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.643.276.500
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	100.000.000		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	10.000.000
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.203.330.900	9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.047.230.900

a	Pengembangan Prasarana Pertanian	175.000.000	a	Pengembangan Prasarana Pertanian	24.500.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	24.500.000
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	175.000.000		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	-
b	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.028.330.900	b	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.022.730.900
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	867.705.000		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	836.605.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	135.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5.078.915.000		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.999.415.000
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.081.710.900		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.051.710.900
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	771.725.000	10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	651.725.000

a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
b	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	671.725.000	b	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	591.725.000
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	671.725.000		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	591.725.000
11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	550.000.000	11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	500.000
a	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	550.000.000	a	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	500.000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500.000.000		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500.000
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-
12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	450.000.000	12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	350.000.000

a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	450.000.000	a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	350.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	-
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penambahan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp 3.079.635.064. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja disebabkan karena penambahan pagu (aspirasi dan pokir) pada sub kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Ke Da Ind				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
										77.075.785.861,00							41.58	
2										49.410.893.754,00							25.58	
2	09									49.410.893.754,00							25.58	
2	09	01								49.380.893.754,00							25.54	
2	09	01	2.02							23.029.388.994,00							23.02	
2	09	01	2.02	0001														
						Persentase ketersediaan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan administrasi keuangan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	225 Orang/bulan	100 %	23.029.388.994,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225 Orang/bulan	23.02
2	09	01	2.06							175.000.000,00							22	

2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
					Persentase ketersediaan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	29 Paket	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29 Paket	2		
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Persentase ketersediaan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	29 Paket	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	6		
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
					Persentase ketersediaan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Paket	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1		
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
					Persentase ketersediaan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Kertosari	100 %	20 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	6		
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Persentase ketersediaan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	6		

2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					24.000.000.000,00						
2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Persentase pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	100 %	1 Unit	100 %%	24.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.911.504.760,00					1.94	
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan dan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	100 %	0 Laporan	25 Laporan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan dan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Laporan	25 Laporan	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	14
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

					Persentase ketersediaan administrasi keuangan dan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	25 Laporan	1.780.004.760,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							265.000.000,00					35	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	persentase pemeliharaan barang siap pakai	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	100 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	15	
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase pemeliharaan barang siap pakai	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	3	
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase pemeliharaan barang siap pakai	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	15	
2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase pemeliharaan barang siap pakai	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							10.000.000,00						2
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							10.000.000,00						2
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
					Persentase penanganan kerawanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang disusun	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	2	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							20.000.000,00						2
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							20.000.000,00						2
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													

						Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	1 paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	2			
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							27.664.892.107,00							16.00	
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							245.000.000,00								13
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							1.000.000,00								6
3	25	03	2.02			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.000.000,00								6
3	25	03	2.02	0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil															
						Persentase nelayan perairan umum yang terbina	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	15 Orang	1 Kelompok	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	6			
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							235.000.000,00								2
3	25	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							225.000.000,00								
3	25	04	2.02	0001		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil															
						Produktivitas ikan nila	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.3 kg/m2	0 Kelompok	10 Kelompok	225.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0 Kelompok				
3	25	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							10.000.000,00								2
3	25	04	2.04	0009		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															

					Produktivitas ikan nila Produktivitas ikan lele	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseong	1,3 kg/m2 12.7 kg/m2	1 Unit	1 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	2
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						9.000.000,00					5
3	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						9.000.000,00					5
3	25	06	2.03	0001		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.52 kg/kapita/tahun	13852.325 Ton	1 Kegiatan	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13852.325 Ton	5
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						27.419.892.107,00					15.87
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						18.460.436.207,00					9.52
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						14.807.159.707,00					9.35
3	27	02	2.01	0001		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi											

3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman												
					Produktivitas ternak sapi Produktivitas ternak ayam ras pedaging Produktivitas ternak domba Produktivitas ternak kambing Produktivitas ternak ayam petelur Persentase kelahiran pedet	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.5 Kg/Ekor 0.75 Kg/Ekor 13.71 Kg/Ekor 13.71 Kg/Ekor 10.88 Kg/Ekor 56 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	3.643.276.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	7
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman												
					Produktivitas ternak sapi Produktivitas ternak ayam ras pedaging Produktivitas ternak domba Produktivitas ternak kambing Produktivitas ternak ayam petelur Persentase kelahiran pedet	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.5 Kg/Ekor 0.75 Kg/Ekor 13.71 Kg/Ekor 13.71 Kg/Ekor 10.88 Kg/Ekor 56 %	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Kegiatan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	10
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							8.047.230.900,00				5.05	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							24.500.000,00				5	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya												

					Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Kegiatan	24.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	5
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							8.022.730.900,00					5.00
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani												
					Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	1 Paket	836.605.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	1.00
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya												
					Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	1 Paket	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani												
					Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	1 Paket	4.999.415.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	7 Unit	2.00
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan												

					Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Paket	2.051.710.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	2.000.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							651.725.000,00				74
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							60.000.000,00				15
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Persentase penanganan penyakit hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 %	20 Laporan	20 Kecamatan	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	20 Laporan	15
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							591.725.000,00				59
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner											
					Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 %	3 Laporan	1 Kegiatan	591.725.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan	59

3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					500.000,00					25	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					500.000,00					25	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
					-	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	130 Ha	-	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	130 Ha	25
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					260.000.000,00					30	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					260.000.000,00					30	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa											
					Prosentase Kelompok Tani yang naik kelas	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.3 %	20 Unit	20 Kecamatan	250.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	25
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa											
					Prosentase Kelompok Tani yang naik kelas	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.3 %	20 Unit	20 Kecamatan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	5
TOTAL											77.075.785.861,00					41.58

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DKPPP untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DKPPP Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DKPPP itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DKPPP dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DKPPP Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DKPPP Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasi Rp63.418.862.653, Belanja Modal Rp4.797.941.100 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 64.187.547.459 atau 94,09%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I sebesar Rp 20.210.575.577 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 20.205.575.577,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp 5.000.000,-.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 DKPPP mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 77.075.785.861,00 yang terdiri dari 11 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DKPPP Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DKPPP dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 27 Juni 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB
TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP, MS.i

Pembina Tingkat I

NIP. 197106301998031005